



Letter of Acceptance

Kepada Yth.
Siti Maghfiroh

Terima kasih atas kiriman paper Anda kepada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) yang ke-21 Samarinda. Paper Anda diterima untuk dipresentasikan dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-21 Samarinda. Informasi tentang paper Anda adalah sebagai berikut :

Judul paper :

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONE

Penulis :

Nunung Nurhikmah - Pemda Cirebon
Margani Pinasti - Universitas Jenderal Soedirman
Siti Maghfiroh - Universitas Jenderal Soedirman

Surat ini kami sampaikan untuk membantu Anda mendapatkan dana untuk keperluan menghadiri SNA XX1 Samarinda.

Kami berharap Anda dapat hadir dan mempresentasikan paper Anda di SNA ke-21 di Samarinda.

Yogyakarta, 25 July 2018

Hormat Kami,

Syaiful Ali., MIS., Ph.D., CA.

Pararel Sesi I : 08.30-09.30, Rabu 5 September 2018
SNA XXI SAMARINDA

Sesi 1.1

Ruang 2 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKMK-005	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Asimetri Informasi pada Senjangan Anggaran dengan Budaya Tri Hita Karana Sebagai Variabel Moderasi	Ni Putu Mery Astari , I.D.A.M. Manik Sastru, Luh Kade Datri, Komang Adi Kurniawan Saputra	Universitas Warmadewa , Universitas Warmadewa, Universitas Warmadewa, Universitas Warmadewa
AKMK-009	ANALISIS ANTESEDEN DAN KONSEKUEN PARTISIPASI ANGGARAN	Rahmad Santoso Subur, Mahmudi	PT Kereta Api Indonesia (Tbk), Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
AKMK-014	PENGARUH E-COMMERCE, LITERASI KEUANGAN, DAN KECAKAPAN UMKM TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM PENGRAJIN TAHU	Antony Asliadi, Eliada Herwiyanti, Rini Widianingsih	Unsoed, Unsoed, Unsoed

Sesi 1.2

Ruang 3 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKMK-026	Pengaruh Kompleksitas Tugas Dinamis terhadap Kinerja: Peran Skema Insentif Turnamen Hibrida Sebagai Variabel Pemoderasi	Agni Astungkara, Supriyadi	Universitas Warmadewa , Universitas Warmadewa, Universitas Warmadewa, Universitas Warmadewa
AKMK-027	Analisis Keefektifan Jalur Pelaporan pada Kondisi Retaliasi dalam Mendorong Whistleblowing (Pendekatan Eksperimen)	Kharisma Lady, Herlina Rahmawati Dewi	PT Kereta Api Indonesia (Tbk), Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
AKMK-031	Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan dalam Perspektif Fraud Triangle	Fauziah Aidafitri, Indayani, Gita Justisa	Unsoed, Unsoed, Unsoed

Sesi 1.3

Ruang 4 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKMK-041	Informasi Asimetri, Status Manajemen, Dan Manajemen Laba: Peran Orientasi Etik (Pengujian Teori Perilaku Pro-sosial)	Priyastwi, Sriwidharmanelly, Krishnoe Rachmi Fitrijati	STIE Widya Wiwaha, Universitas Bengkulu, Universitas Jendral Soedirman
AKMK-047	Kecenderungan Menciptakan Budgetary Slack di Lingkungan Abusive Supervision: Peran Moderasi Penalaran Moral	Lufi Yuwana Mursita, Ertambang Nahartyo	Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada
AKMK-049	Peran Insentif, Hubungan Emosional, dan Keadilan Organisasi dalam Mengefektifkan Whistleblowing System: Pendekatan Eksperimen	Dwi Marlina Wijayanti, Fachmi Pachlevi Yandra	UIN Sunan Kalijaga, STIE YKPN Yogyakarta

Sesi 1.4

Ruang 5 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKMK-055	PLS-PATH MODELING ASPEK KEPEMIMPINAN DALAM PRAKTEK MANAJEMEN MUTU TERPADU DEMI PENCAPAIAN KINERJA KUALITAS YANG UNGGUL	F.X. KURNIAWAN TJAKRAWALA, NURAINUN BANGUN	PRODI PPAK - FE UNIVERSITAS TARUMANAGARA, PRODI AKT-S1_FE UNIVERSITAS TARUMANAGARA
AKMK-064	Pengujian Faktor Individual, Situasional, Organisasional, dan Demografi terhadap Intensi Whistleblowing: Konfirmasi Teori Prososial	Adinda Putri Ismayunda, Badingatus Solikhah, Agung Yulianto	Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang
AKMK-066	PENGARUH KETERSEDIAAN INFORMASI PUBLIK DAN MONITORING CONTROL TERHADAP HUBUNGANANTARA SELF EFFICACY DAN ESCALATION OF COMMITMENT	maulita	Politeknik Negeri Samarinda

Sesi 1.5

Ruang 6 (Kualitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKMK-001	GREEN ACCOUNTING; UPAYA MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM MENUNJANG KEBERLANGSUNGAN USAHA	M. Wahyuddin Abdullah, Hardianti	UIN Alauddin Makassar, UIN Alauddin Makassar
AKMK-013	Pemetaan Hasil Penelitian Akuntansi Manajemen di Indonesia	Ratnaningrum, Lya Latifah, Suyanto, Y. Anni Aryan, Doddy Setiawan	STIE Triandara Kartasura/ PDIE Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Semarang/ PDIE Universitas Sebelas Maret, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa/ PDIE Universitas Sebelas Maret, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
AKMK-011	Balanced Scorecard: Is It Beneficial Enough? A Literature Review	Ratnaningrum, Y. Anni Aryan, Doddy Setiawan	STIE Triandara Kartasura/ PDIE Universitas Sebelas Maret, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

Sesi 1.6

Ruang 7 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKMK-057	ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE DISCLOSURES AND FIRM RISK	Fitri Anita Aritonang, Puji Harto	Diponegoro University, Diponegoro University
AKMK-036	Analisis Komparasi Pengungkapan Sustainability Report di Indonesia, Thailand, Australia dan India	Lusy Imawati, Agung Nur Probohudono	
AKMK-038	PENGARUH NORMA SUBJEKTIF, KEADILAN PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS, DAN SELF EFFICACY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	Darari Raihan, Ataina Hidayati	Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Gadjah Mada

Sesi 1.7

Ruang 8 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
ASPAM-003	PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA:STUDI PADA SEKOLAH DASAR	SOPHIA MOLINDA KAKISINA, Indra bastian	STIE PEMBNAS, Universitas Gadjah Mada
ASPAM-005	PERUBAHAN ANGGARAN, PARTISIPASI ANGGARAN, DAN GAYA KEPEMIMPINAN PADA PEMERINTAH DAERAH Bukti Empiris dari Perspektif Goal-Setting pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Aceh	Afrah Junita, Syukriy Abdullah	Universitas Samudra, FEB Unsyiah
PPIK-018	Determinan Faktor-Faktor Penggunaan E-Filing Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Dosen PTS di Banjarmasin)	Saifhul Anuar Syahdan, H. Safriansyah, Hj. Antung Noor Asiah	STIE Indonesia Banjarmasin, STIE Indonesia Banjarmasin, STIE Indonesia Banjarmasin

Sesi 1.8

Ruang 9 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
PPJK-019	Determinan Praktik Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Melarosia Cintia Ayu Ananta, Umi Sulistyanti	Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia
PPJK-030	Peranan Related Party Transaction dan Manajemen Laba dalam Menurunkan Agresivitas Pajak	Masna Ellyani, Ataina Hidayati	Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia
PPJK-034	Pengaruh Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak melalui Manajemen Laba Pada BUMN di Indonesia	Arna Suryani, Marissa Putriana, Venny Junica Utami	Universitas Batanghari, Universitas Batanghari, Universitas Batanghari

Sesi 1.9

Ruang 10 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
PPJK-035	KEADILAN SISTEM, KETIDAKPERCAYAAN DAN SIKAP LOVE OF MONEY TERHADAP TAX EVASION	Desiana, Listya Sugiyarti	Universitas Pamulang, Universitas Pamulang
PPJK-044	Analisis Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial terhadap Penghindaran Pajak dengan Keberagaman Dewan Komisaris sebagai Variabel Moderasi	Inna Rahmania Anindita, Dwi Martani	Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
PPJK-045	Pengaruh Koneksi Politik dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Aggressiveness di Indonesia	Agita Zafi Rahmasari, Agung Nur Probodhono	Universitas Sebelas Maret, Universitas Sebelas Maret

Sesi 1.10

Ruang 11 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
SIPE-026	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Mobile Commerce Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Di Kota Malang	Devinta Mahardika, Kristin Rosalina	, Universitas Brawijaya
SIPE-029	Pengaruh Opini Audit, Financial Distress, Perubahan ROA dan Pertumbuhan Perusahaan Klien terhadap Auditor Swithing di Indonesia	Abriyani Puspaningsih dan Feby Fitria Sari	Universitas Islam Indonesia
SIPE-076	PENGARUH KARAKTERISTIK PERSONAL AUDITOR TERHADAP PENERIMAAN PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDIT	Stephanie Ruth Winarto, Lodovicus Lasdi	Unika Widya Mandala Surabaya, Unika Widya Mandala Surabaya

Sesi 1.11

Ruang 12 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
ASPAK-011	Pengklasteran Pemerintah Daerah di Indonesia untuk Optimalisasi Analisis Kondisi Keuangan	Panji Ari Sasongko, Irwan Taufiq Ritonga, M.Bus., Ph.D., CA.	Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada
ASPAK-014	Desain Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Studi pada Piutang Pajak Restoran di Pemerintah Kabupaten Bantul	Shofi Rahmawati, Irwan Taufiq Ritonga	Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada
ASPAK-021	STUDI PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN PENDEKATAN AKUNTANSI ARUS DANA	Rida Perwita Sari , Soegeng Soetedjo , Indra Bastian	UPN Veteran Jawa Timur , Universitas Airlangga , Universitas Gadjah Mada

**Pararel Sesi II : 10.15-11.15, Rabu 5 September 2018
SNA XXI SAMARINDA**

Sesi 2.1

Ruang 2 (Kualitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
ASPAK-007	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website	Nuansa Gilang Insani, Irwan Taufiq Ritonga	Universitas Gadjah Mada / BPKP, Universitas Gadjah Mada
ASPAK-019	Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia	Ratih Indah Veranti, Irwan Taufiq Ritonga	Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada
ASPAK-023	Sintagmatik dan Paradigmatik Laporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum: Kajian Semiotik de Suassure	Dian Syariati, Sri Pujiningsih, Sawitri Dwi Prastiti	Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Sesi 2.2

Ruang 3 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
AKSR-001	Jenis Pembiayaan, Corporate Governance, Human Capital Investment dan Implikasinya Terhadap Non Performing Financing	Ni'ma Ulul Mustafidah, Hasan Mukhibad	Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang
AKSR-006	Ukuran Perusahaan dan Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia	Annisa Fithria	Universitas Ahmad Dahlan
AKSR-007	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Keandalan Laporan dan Akuntabilitas Terhadap Pertumbuhan Zakat Infak Sedekah	RUSLIN, HASBUDIN, MUNTU ABDULLAH, SULVARIANI TAMBURAKA	UNIVERSITAS HALU OLEO, UNIVERSITAS HALU OLEO, UNIVERSITAS HALU OLEO, UNIVERSITAS HALU OLEO

Sesi 2.3

Ruang 4 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
AKSR-019	Faktor Internal dan Eksternal Yang Memengaruhi Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah Indonesia	Mega Diah Alhikmatu Sholikhah, Isna Yuningsih, Ibnu Abni Lahaya	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
AKSR-022	Income Smoothing: Sebuah Tinjauan dalam Etika Bisnis Islam	RIZKIANA ISKANDAR, DEWI AMALIA	Mahasiswa PPs FEB UGM, UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
AKSR-027	Marketabilitas dan Mediasi Pembiayaan Bagi Hasil	Ahmad Abbas, Ainun Arizah	IAIN Parepare, Universitas Muhammadiyah Makassar

Sesi 2.4

Ruang 5 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
ASPSIA-008	APAKAH KARYAWAN MEMILIKI NIAT UNTUK MELAKUKAN WHISTLEBLOWING?: Sebuah Studi Eksperimen	Muhammad Ikbali, Wuryan Andayani	Universitas Mulawarman, Universitas Brawijaya
ASPSIA-009	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)	Muhammad Gilang Abadi, Enggar Diah Puspa Arum, Netty Herawaty	Universitas Jambi, Universitas Jambi, Universitas Jambi
ASPSIA-020	FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENGGUNAAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) MELALUI E-GOVERNMENT DI INDONESIA	Abdul Saming, Grace T. Pontoh, Syarifuddin Rasyid	Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin

Sesi 2.5

Ruang 6 (Kualitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
AKSR-002	Penerapan PSAK 102 Pada Transaksi Murabahah di BMT	Raffida Arnelia Winata, Bambang Waluyo, Nedsal Sixpria	Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta
AKSR-016	Pengungkapan Islamic Social Reporting Dalam Menunjang Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Ditinjau Berdasarkan Shariah Enterprise Theory (Studi Empiris Pada Bank Syariah Mandiri)	Rizki Amalia, Jamal Majid, Memen Suwandi	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
AKSR-018	Praktik Pertanggungjawaban Sosial dalam Islam pada Entitas Bisnis Islami	Sartini Wardiwiyono, Arif Septa Yuniarto	Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan

Sesi 2.6

Ruang 7 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
AKMK-015	TEKANAN AKUNTABILITAS DALAM DILEMA ETIKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIKA	Krisnhoe Rachmi Fitrijiati, Mahfud Sholihin	Universitas Gadjah Mada
AKMK-023	Pengaruh Umpun Balik Pada Senjangan Anggaran dengan Efikasi Diri Sebagai Variabel Pemoderasi	Aryani Intan Endah Rahmawati, Supriyadi	Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Gadjah Mada
AKMK-052	Perilaku Berbagi Pengetahuan Akuntansi pada Karyawan Bagian Akuntansi Perusahaan Perbankan di Kota Bengkulu: Pendekatan Theory of Planned Behavior	Madani Hatta, Fanni Indah Sari, Baihaqi	Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu

Sesi 2.7

Ruang 8 (Kualitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
AKMK-048	Refleksi Nilai-Nilai Personal Individu Pada Fenomena Budgetary Slack	Putu Yunartha Pradnyana Putra, Farah Nisa UI Albab, Christopher Clark Aditya Swara	Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada
AKMK-063	AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN DENGAN ECO-EFFICIENCY DALAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Hentini Sellaoni, Novita	Universitas Trilogi, Universitas Trilogi
AKMK-019	REFLEKSI CORPORATES SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM KONTEKS BUDAYA: ANTARA BARAT DAN TIMUR	I Dewa Ayu Eka Pertiwi	Universitas Warmadewa

Sesi 2.8

Ruang 9 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
AKPM-140	PENGARUH PENERAPAN XBRL TERHADAP COST OF EQUITY PERUSAHAAN TERBUKA DI INDONESIA	Neng Nurhasanah, Siti Nurwahyuningstih Harahap	Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
AKPM-148	Apakah Nilai Aset Takberwujud Menjadi Lebih Relevan Setelah Konvergensi IFRS?	Sella Dwi Purnama Sari, Ersya Tri Wahyuni	Universitas Padjadjaran, Universitas Padjadjaran
AKPM-099	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Penghindaran Pajak, dan Kinerja Laba: Bukti Empiris dari Perusahaan Publik di Indonesia	Cahyaningsih, Indra Wijaya Kusuma, Fu'ad Rakhman, Singgih Wijayana	Universitas Telkom, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada

Sesi 2.9

Ruang 10 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
AKPM-096	Manajemen Laba Mendorong Realisasi Atas Kesempatan Investasi Perusahaan	Liansuspirini Amekan, Emi Ekawati	Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Kristen Duta Wacana
AKPM-113	Environmental Social Governance Disclosure (ESGD) dan Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia	Andri Prastiwi, Faisal, Etna Nur Afri Yuyetta	Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro
AKPM-112	ANALISIS PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016	Puti Athiah K. Adhistry, Dwi Martani	Universitas Indonesia, Universitas Indonesia

Sesi 2.10

Ruang 11 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
AKPM-049	Pengaruh Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	Nur Zahrah Yulitaningstias, Erna Hidayah	Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia
AKPM-054	HERDING BEHAVIOUR DAN PENCATATAN KEUANGAN UMKM (Studi pada UMKM Konveksi di Laweyan Solo)	Malida Annastasia Ribka, Theresia Woro Damayanti	Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
AKPM-072	Kinerja Keuangan Sesudah Initial Public Offering	Ni Putu Lissya Suryantari, Gerianta Wirawan Yasa	Universitas Udayana, Universitas Udayana

Sesi 2.11

Ruang 12 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
ASPGG-005	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Tingkat Kemiskinan Dan Pengangguran	Yanuar Fahd ST M.Si, Mediaty, Syarifuddin Rasyid	BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin
ASPGG-006	Akuntabilitas Elektoral di Indonesia: Pengaruh Kandungan Informasi Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Terpilihnya Kembali Petahana	Syarif Hidayatullah Suleman, Mediaty, Aini Indrijawaty	Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin
ASPGG-014	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Pengendalian Internal Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Klaten	Tyas Hayuwati, Abdul Halim	Universitas Gadjah Mada

Pararel Sesi III : 11.15-12.15, Rabu 5 September 2018
SNA XXI SAMARINDA

Sesi 3.1

Ruang 2 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFLIASI	PENULIS
ASPGG-028	PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP NIAT UNTUK MENGADOPSI E-PROCUREMENT	Siti Fatimah, Habiburrochman	Akuntansi FEB Unair, Dept Akuntansi FEB Universitas Airlangga
ASPGG-031	Pengaruh Karakteristik Daerah, Komitmen Kepala Daerah, dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 - 2016	Nurin Aulia, Muhammad Hudaya	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
ASPGG-033	Intensi whistleblowing, Personal Cost, Komitmen Organisasi dan Tingkat Keseriusan Kecurangan	Mirna Indriani, Aida Yulia, Lisa Pira Ariska	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

Sesi 3.2

Ruang 3 (Kualitatif/kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
ASPGG-015	ASET SEBAGAI INSTRUMEN KESEJAHTERAAN: PEMAKNAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	La Ode Anto	Universitas Halu Oleo
ASPGG-037	AKUNTABILITAS FINANSIAL, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA	Marta Yulicia Sari, Priyo Hari Adi	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
AKSR-025	AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID BERDASARKAN PRINSIP AMANAH DAN FATHANAH (Studi Fenomenologi pada Masjid di Dusun Nganjuk, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten	Saiful Muchlis, RIDWAN, S.Ak	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Sesi 3.3

Ruang 4 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
ASPSIA-003	MODEL REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK	Abdul Halim , Ahmad Dahlan	Universitas Gajayana Malang, Universitas Gajayana Malang
ASPSIA-004	Peran Agency Theory dalam Audit Report Lag	Olivia Putri Santoso, Elfina Astrella Sambuaga	Universitas Bunda Mulia, Universitas Bunda Mulia
ASPSIA-005	MODEL PENINGKATAN KINERJA AUDITOR MELALUI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH TIM DI PEMERINTAH DAERAH INDONESIA	LISMAWATI	JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU

Sesi 3.4

Ruang 5 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKSR-002	Penerapan PSAK 102 Pada Transaksi Murabahah di BMT	Raffida Arnelia Winata, Bambang Waluyo, Nedsal Sixpria	Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta
AKSR-016	Pengungkapan Islamic Social Reporting Dalam Menunjang Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Ditinjau Berdasarkan Shariah Enterprise Theory (Studi Empiris Pada Bank Syariah Mandiri)	Rizki Amalia, Jamal Majid, Memen Suwandi	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
AKSR-018	Praktik Pertanggungjawaban Sosial dalam Islam pada Entitas Bisnis Islami	Sartini Wardiwiyono, Arif Septa Yuniarto	Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan

Sesi 3.5

Ruang 6 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
ASPSIA-028	DETERMINAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA SECARA ONLINE	Dewi Lesmanawati, Fahmi Rizani, Sarwani	Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Lambung Mangkurat
ASPSIA-042	PENGARUH FRAUD TRIANGEL DALAM MENDETEKSI FINANCIAL STATEMENT FRAUD (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI)	suri novira, Yesi Mutia Basri, Pipin Kurnia	universitas riau, Universitas Riau, Universitas Riau
AKPM-038	THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DISCLOSURE ON FIRM VALUE WITH FINANCIAL PERFORMANCE AS INTERVENING VARIABLE	Muslichah	STIE Malangkecewara

Sesi 3.6

Ruang 7 (Kualitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
ASPSIA-025	STUDI FENOMENOLOGI BUDAYA EWUH PAKEWUH AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH	Astri Furqani, Fatah Firdaus	Jurusan Akuntansi FEB Universitas Wiraraja Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep
ASPSIA-045	Kompleksitas dalam Mencapai Audit Internal Pemerintah Daerah yang Efektif: dengan Pendekatan Teori Institusional	Indah Supragita, Suryanto	Magister Akuntansi FEB - UGM, Fakultas Ekonomika dan Bisnis - Universitas Gadjah Mada
AKPM-124	Pengungkapan Privat dan Penciptaan Nilai Perusahaan	Yanti Puji Astutie	Universitas Pancasila Tegal

Sesi 3.7

Ruang 8 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
CG-002	MODEL KERANGKA KERJA TATA KELOLA DAN EFISIENSI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI JAMBI	Mukhzarudfa Mukhzarudfa	Universitas Jambi
CG-007	Isomorfisme Mimetik pada Laporan Keberlanjutan: Peranan Kepemilikan Keluarga	Astrid Rudyanto, Lindawati Gani, Hilda R. Argawa	Trisakti School of Management, Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
CG-016	PENGUNGKAPAN COMPLY OR EXPLAIN PADA PEDOMAN TATA KELOLA DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA PERUSAHAAN	Huda Aulia Arifin, Vera Dianty	Universitas Indonesia, Universitas Indonesia

Sesi 3.8

Ruang 9 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
CG-008	Karakteristik Eksekutif dan Kesalahan Estimasi Akrua	Poppy Nurmayanti M, Indra Wijaya Kusuma, Fu'ad Rakhman, Singgih Wijayana	Universitas Riau , Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada
CG-019	TATA KELOLA PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, HAK KONTROL, DAN PRAKTIK EKSPROPRIASI	Fadilah Dwi Putri, Imam Subekti	Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya
AKPM-150	The Readiness of Integrated Reporting Implementation in ASEAN Exchange: A Perspective of FTSE ASEAN Stars Index	Tegar Galang Anantha, Denies Priantinah	Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta

Sesi 3.9

Ruang 10 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
CG-047	PENGARUH IMPLEMENTASI IFRS, KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT TERHADAP EARNINGS QUALITY	Muhammad Ihlashul 'Amal, Basuki Hadiprajitno, Zulaikha	Fakultas Eoknomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Fakultas Eoknomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Fakultas Eoknomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
CG-032	PENGARUH AGRESIVITAS PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI PEMODERASI	Rika Lidyah, Dinnul Alfian Akbar, Lidia Desiana, Fernando Africano	UIN Raden Fatah Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Raden Fatah Palembang
CG-039	DIVERSITAS KOMISARIS, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN LUAS PENGUNGKAPAN MANRISK	Aâ€™mal Binti Qurrota Aâ€™yun, Lintang Venusita	Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Surabaya

Sesi 3.10

Ruang 11 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
CG-048	Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Earnings Management	Ani Purwanti, Rusdiah Iskandar, Yoremia Lestari br.Ginting	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman
CG-044	PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN FINANCIAL DISTRESS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BE	Putri Astari, Hadri Kusuma	Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia
CG-028	SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	Nurna Aziza, Elsa Fitri Utami	Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu

Sesi 3.11

Ruang 12 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
PPIK-003	KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAN NILAI-NILAI ETIK KEMENTERIAN KEUANGAN (STUDI PADA KANWIL DIREKTORAT JENDRAL PAJAK Jakarta Selatan I)	Irawan Ardi Susilo, Syahril Djaddang, Suyanto, Endang Ety Merawati	Magister Akuntansi UP Jakarta, Magister Akuntansi UP Jakarta, STIE IPWI Jakarta, Sekolah PascaSarjana UP Jakarta
PPIK-011	Dua Dekade Simposium Nasional Akuntansi: Sebuah Studi Bibliografi Riset Perpajakan	Nurul Herawati, Bandi	Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret
PPIK-015	Keterkaitan Religiusitas, Gender, LoM dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak	Dewi Sofha, Michael Ardho Dewanta, Zaky Machmuddah, St. Dwiwarso Utomo	Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Dian Nuswantoro

Pararel Sesi IV : 13.30-14.30, Kamis 6 September 2018

SNA XXI SAMARINDA

Sesi 4.1

Ruang 2 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
CG-017	Corporate Governance and Firm-Specific Crash Risk: Evidence From Indonesian Firms in 2016	Yosua Sihombing, Vera Diyanty	Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
PAK-009	Determinan Hasil Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi Dalam	Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA., CA.,	Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya
ASPPIA-022	Efektivitas Integrated Financial Management and Information System pada Proses Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat	Lutfi Hakim, Teguh Iman Maulana	Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Sesi 4.2

Ruang 3 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
PAK-010	PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK MAHASISWA AKUNTANSI : DIMENSI FRAUD DIAMOND (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia)	Titi Aditiawati, Neni Meidawati	Universitas Islam Indonesia, FE Universitas Islam Indonesia
PAK-018	Aplikasi Model Social Cognitive Career Theory untuk Memprediksi Niat Mahasiswa Bekerja Sebagai Akuntan Publik	Vania Pradipta Gunawan, Retno Yulianti	Universitas Prasetya Mulya, Universitas Prasetya Mulya
PAK-025	Pengaruh Ukuran Kelompok Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Mahasiswa Akuntansi	Elizabeth Pricillawati, Intiyas Utami, Ika Kristianti	Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Kristen Satya Wacana

Sesi 4.3

Ruang 4 (Kualitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
PAK-013	Rigour in qualitative studies: Are we on track? 1 I	Ani Wilujeng Suryani, Helianti Utami	Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Malang
PAK-026	Analisis Ketangkasannya Untuk Meninjau Ketahanan Ekonomi Pada UMKM	Indah Putri, Nadhiratuz Zahrah Hasibuan, Gaffar Hafiz Sagala, Ali Fikri Hasibuan	Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Medan
SIPE-011	Communicating Accounting Information on Social Media: A Preliminary Study of Indonesian Firms	Stevanus Pangestu, Weli	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Sesi 4.4

Ruang 5 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
CG-030	The Influence of CEO Turnover, Audit Committee, and Board Meeting towards Earnings Management	Aura Kartika, Vita Elisa Fitriana, SE., M.Sc	President University, President University
CG-029	Board Structure, Ownership, Intellectual Capital and Firm Value	Saarc Elyse Hatane, Melinda Setiadi, Josua Tarigan	Universitas Kristen Petra, Petra Christian University, Petra Christian University
CG-014	Analysis of the Impact of the Quality of Audit Committee, Internal Audit and External Audit on Financial Reporting Quality	Maulida Salmi Utie, Ratna Wardhani	Universitas Indonesia, Universitas Indonesia

Sesi 4.5

Ruang 6 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
PPIK-023	PENGARUH BEBAN PAJAK DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2015	Beatries Yunisari Bunga Datu, CHRISTOPHORUS HENI KURNIAWAN	Universitas Atma Jaya Yogyakarta, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PPIK-025	E-FILING, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN INTERNET	Berlinda Noviani, Isti Rahayu	Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia
PPIK-028	Kepatuhan Pajak: Tax Amnesty Berulang Dan Penegakan Hukum	Ade Lisa Matasik, Theresia Woro Damayanti	Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana

Sesi 4.6

Ruang 7 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
PPIK-031	PERAN IMBALAN PASKA KERJA SEBAGAI PEMODERASI ATAS DETERMINASI TERHADAP PENGHASILAN KENA PAJAK	Muntaha, Syahril Djaddang, Suratno	Magister Akuntansi Universitas Pancasila Jakarta, Magister Akuntansi Universitas Pancasila Jakarta, Magister Akuntansi UP Jakarta
PPIK-032	ANALISIS PENGARUH CUSTOMER CONCENTRATION TERHADAP CORPORATE TAX AVOIDANCE	Patria Widya Rahminda, Riko Riandoko, Muhammad Rhea Ramadhan	Direktorat Jenderal Pajak, Politeknik Keuangan Negara-STAN, Direktorat Jenderal Pajak
PPIK-033	Pengaruh CSR, Cost of Debt, dan Sales Discount Terhadap Tax Avoidance	Erie Irianti, Isti Ulfani Dwi Lestari, Muhammad Hendrawan, Zaki Fakhroni	FEB, Universitas Mulawarman, FEB, Universitas Mulawarman, FEB, Universitas Mulawarman, FEB, Universitas Mulawarman

Sesi 4.7

Ruang 8 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
PPJK-037	KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK: STUDI EMPIRIS PADA UNIT USAHA KECIL DAN MENENGAH	Famita Azzakhusna, Hadri Kusuma	Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia
PPJK-038	Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kemudahan, Kualitas Sistem Dan Kualitas Informasi Terhadap Penggunaan E-Filing	ELVIRHA DWI KARTIKA, ETHIKA, RESTI YULISTIA MUSLIM	UNIVERSITAS BUNG HATTA, UNIVERSITAS BUNG HATTA, UNIVERSITAS BUNG HATTA
PPJK-042	Apakah Corporate Social Responsibility Mampu Memediasi Hubungan Earning Management dan Tax Avoidance?	Retnaningtyas Widuri, Adhityawati Kusumawardhani, Yenni Mangoting	Universitas Kristen Petra, Universitas Kristen Petra, Universitas Kristen Petra

Sesi 4.8

Ruang 9 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
ASPSIA-007	ANALISIS PENGARUH RELIGIUSITAS, KEEFEKTIFAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KESESUAIAN KOMPENSASI TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI	Dinda Pertiwi Rolobessy, Reni Yendrawati	Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia
ASPSIA-047	DETERMINAN KEMAMPUAN AUDITOR PEMERINTAH DALAM MENDETEKSI KERUGIAN DAERAH DENGAN BEBAN KERJA SEBAGAI PEMODERASI	Kiswanto, Setio Budi Wicaksono	Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang
ASPSIA-048	ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT BPK DENGAN TINGKAT PENGUNGKAPAN LKPD SEBAGAI VARIABEL MODERATING	Tia Eka Yosa, Kiswanto, Trisni Suryarini	Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang

Sesi 4.9

Ruang 10 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
PPJK-068	PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI	Ni Kadek Debby Bella Putri, Yana Ulfah, Musviyanti	FEB Universitas Mulawarman, FEB Universitas Mulawarman, FEB Universitas Mulawarman
PPJK-074	MINAT MENGGUNAKAN E-FILING BERBASIS TECHNOLOGY READINESS AND ACCEPTANCE MODEL (TRAM) (STUDI KASUS KPP PRATAMA SALATIGA)	Elfara Wijaya, Theresia Woro Damayanti	Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
PPJK-077	DETERMINAN PERILAKU TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada Tahun 2014-2016)	Nadia Zahra Yusmanda Putri, Hadri Kusuma	Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia

Sesi 4.10

Ruang 11 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
PPJK-073	Tax Planning for Preserving Socioemotional Wealth of Family Owned Firms in Indonesia	Melati Oktafiyani, St. Dwiarmo Utomo, Sri Rahayu, Marchelina Herlin Setiawan	Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Dian Nuswantoro
PPJK-065	Determinan Penggunaan E-Filing dengan Variabel Intervening Minat Penggunaan	Yuni Nustini, Andre Rizki Pratama	Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia
PPJK-078	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Asing, dan Tax Haven Terhadap Agresivitas Transfer Pricing	Jessica Andrea Shinta, Amelia Sandra	Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia

Sesi 4.11

Ruang 12 (Kualitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKSR-028	TRANSAKSI E-COMMERCE: ANALISIS SUDUT PANDANG AKAD WAKALAH DAN SALAM SERTA PSAK 103	Retno Dyah Pekerti, Dewi Susilowati, Eliada Herwiyananti	Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Jenderal Soedirman
AKSR-036	Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pendanaan Perusahaan Pembiayaan Syariah	ifa Hanifia Senjiati	Universitas Islam Bandung
AKSR-037	AKUNTABILITAS KEUANGAN BERBASIS KOMITMEN BERKESADARAN IBADAH	Abdul Gafur, Soegeng Soetedjo, Iwan Triyuwono	Universitas Mulawarman, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya

Pararel Sesi V : 12.30-15.30, Kamis 6 September 2018
SNA XXI SAMARINDA

Sesi 5.1

Ruang 2 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKMK-053	Informasi Kinerja Relatif Kelompok, Insentif, dan Berbagi Pengetahuan	Dwi Susanti, R.A. Supriyono	Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
AKMK-069	Perubahan Organisasi, Perubahan Praktik Akuntansi Manajemen, Dan Kinerja Perusahaan	Nanik Wahyuni	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
CG-013	PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT TERHADAP EARNINGS VOLATILITY DENGAN EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT DAN KUALITAS AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI	Endah Ningtyas, Desi Adhariani, PhD	Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

Sesi 5.2

Ruang 3 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
SIPE-008	ANALISIS FRAUD DIAMOND DALAM MENDETEKSI POTENSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2016)	Huda Aulia, Reni Yendrawati	Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
SIPE-021	DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK BERBASIS E-FILING : PENGADOPSIAN MODEL DELONE MCLEAN DAN UTAUT	Riri Novita Kara, Dekar Urumah	Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia
SIPE-023	Pengaruh Tekanan Ketaatan dan Kualitas Fungsi Audit Internal Terhadap Perilaku Kecurangan Pelaporan Keuangan: Studi Eksperimen	Lu'lu' Nafiati, Hardo Basuki	Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Gadjah Mada

Sesi 5.3

Ruang 4 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
SIPE-030	PENGARUH INTERAKSI ANTARA PENERAPAN KODE ETIK PROFESI DENGAN KOMPETENSI AUDITOR, DUE PROFESSIONAL CARE DAN SKEPTISME PROFESIONAL TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN	Asti Agustin Pratiwi, Christina Tri Setyorini, Siti Maghfiroh	Maksi UNSOED, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Jenderal Soedirman
SIPE-031	ANALISIS PENERIMAAN TABK DENGAN APLIKASI AUTOCAD DI PERWAKILAN BPKP	Angky Verdian Diputra, Yuliansyah, S. E., M. S. A., Ph. D., Akt., Pigo Nauli, S. E., M. Sc.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Universitas Lampung, Universitas Lampung
SIPE-034	KEPUASAN KLIEN TERHADAP KUALITAS AUDIT DAN KUALITAS PELAYANAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK	Ni Made Suindari, A.A Pt. Agung Mirah Purnama Sari	Universitas Warmadewa, Universitas Warmadewa

Sesi 5.4

Ruang 5 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
SIPE-045	Pengaruh Pengendalian Internal dan Ethical Judgement terhadap Pencegahan Kecurangan	Nur Khasanah Sahidin, Grace T. Pontoh, Muhammad Ishak Amsari	Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin
SIPE-047	Pengaruh Opini Audit Going-Concern terhadap Cost of Equity dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi	Deriqqa Mawaddah Yulfa, Fitriany Amarullah	Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
SIPE-041	Mitigating Negative Effect of Technostress: Introducing Chaos Theory in Experimental Setting	Sriwidharmanely, Sumiyana	Program Doktor dan Magister Sains FEB UGM, University of Gadjah Mada

Sesi 5.5

Ruang 6 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
SIPE-057	Pengaruh Kualitas Software Akuntansi dan Kualitas Informasi Terhadap Kinerja Pengguna dengan Mediasi Kepuasan Pengguna pada Industri Perhotelan di Kota Bengkulu	Madani Hatta, Raijifa Jazunqa, Baihaqi	Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
SIPE-059	ANALISIS-PENGARUH PARTNER AUDIT WANITA TERHADAP BIAYA AUDIT DAN KUALITAS-AUDIT	Argo Tamtomo, Fitriany	UNIVERSITAS INDONESIA, UNIVERSITAS INDONESIA
SIPE-060	Pengaruh Komitmen Organisasi, Kolektivisme, Nilai-Nilai Etika Perusahaan dan Penalaran Moral terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing	Baihaqi, Bintang Lamtiur, Madani Hatta	Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu

Sesi 5.6

Ruang 7 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
SIPE-062	Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Social Commerce	Refika Nurliani Fauzia, Arief Rahman	Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia
SIPE-067	Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Pentagon	Cintia Zelin, Marfuah	Prodi Akuntansi FE UII Yogyakarta, Prodi Akuntansi FE UII Yogyakarta
SIPE-073	Peran Seremonial Komite Audit, Manager yang Terlalu Percaya Diri, dan Fee Audit	Nur'ain Isqodrin, M. Roy Aziz H, Kusharyanti	Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada

Sesi 5.7

Ruang 8 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
CG-016	PENGUNGKAPAN COMPLY OR EXPLAIN PADA PEDOMAN TATA KELOLA DI INDONESIA DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA PERUSAHAAN	Huda Aulia Arifin, Vera Diyanty	Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
CG-019	TATA KELOLA PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, HAK KONTROL, DAN PRAKTIK EKSPROPRIASI	Fadilah Dwi Putri, Imam Subekti	Universitas Brawijaya, Universitas Brawijaya
SIPE-061	Pengaruh Locus of Control, Self Efficacy, Komitmen Profesi dan	alvi rahmillah, endang ruhiyat	universitas pamulang, universitas pamulang

Sesi 5.8

Ruang 9 (Kualitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
PPJK-004	Meta Sintesis: Kritik Terhadap Kepatuhan Sukarela (Voluntary Compliance) Untuk Membangun Kepatuhan Pajak yang Berkomitmen (Commitment Compliance)	Yenni Mangoting	Universitas Kristen Petra
PPJK-057	Meninjau Mekanisme Restitusi di Indonesia: Beberapa Perspektif	Hessy Erlisa Frasti	Danny Darussalam Tax Center (DDTC)
PPJK-079	ANALISIS PENILAIAN TRANSAKSI PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST PADA INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS BUMI	Benny Setiawan, Anggit Priyambudi, dyah purwanti	Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Keuangan Negara STAN
AKPM-094	DIMENSI KRITIS PEMIKIRAN AKUNTANSI YANG TERALIENASI: DIALOG IMAJINER KONSTRUKSIONIS DAN DEKONSTRUKSIONIS	Akhmad Riduwan, Andayani	STIE Indonesia (STIESIA) Surabaya, STIE Indonesia (STIESIA) Surabaya

Sesi 5.9

Ruang 10 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
ASPAK-024	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA PEMERINTAHAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2014-2)	AMALIA IKLASINIRA, ARIEF RAHMAN	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
ASPAK-025	Efek Moderasi Pertumbuhan Aktiva pada Pengaruh Penyertaan Modal terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Dewi Kusuma Wardani, Siti Nurjanah	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
ASPAK-030	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI META-ANALISIS	Priyo Hari Adi	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Sesi 5.10

Ruang 11 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKSR-013	DETERMINAN TINGKAT PENGUNGKAPAN ZAKAT PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA	Siti Afidatul Khotijah, Hadri Kusuma	Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia, Magister Akuntansi, Universitas Islam Indonesia
AKSR-017	KEPERCAYAAN AFEKTIF DAN KOGNITIF DAN MINAT BAYAR ZAKAT	Mohammad Fahmi Ikhwandha, Ataina Hidayati	Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia
AKSR-034	PERAN RETURN ON EQUITY ATAS PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP ISLAMIC SOCIAL RESPONSIBILITY	Dinnul Alfian Akbar, Kiryanto, Kiryanto, Rika Lidyah, Lidia Desiana, Fernando Africano	UIN Raden Fatah Palembang, UNISSULA, Unissula, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, UIN Raden Fatah Palembang

Sesi 5.11

Ruang 12 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKSR-023	KAJIAN PANGROKI [®] ™ DAN PENGKILALAN SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS BIAYA DAN UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Pada Acara Ritual Rambu Solo [®] ™ Suku Toraja)	Tetty Indrayani Pasinnong, S., Ak, Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak., CA, Saiful Muchlis	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
AKSR-024	OPTIMALISASI SHARIAH [®] ™AH ENTERPRISE THEORY DALAM MENEGAH PRAKTIK RIBA PADA AKAD MURABAHAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)	Suwardi Bambang Hermanto, Saiful Muchlis	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
AKPM-036	PERAN KEPEMILIKAN IMMEDIATE TERHADAP MANAJEMEN LABA DAN PENGHINDARAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF POLITICAL COST HYPOTHESIS	Aulia Rahmi, Irwansyah, Zaki Fakhroni	Mahasiswa Akuntansi, FEB, Universitas Mulawarman, FEB, Universitas Mulawarman, FEB, Universitas Mulawarman

**Pararel Sesi VI : 08.00-09.00, Jumat 7 September 2018
SNA XXI SAMARINDA**

Sesi 6.1

Ruang 2 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
PPJK-049	PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGAMPUNAN PAJAK	Ni Kadek Rahayu Nadi, Dwi Martani	Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
PPJK-055	Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Risiko	Dhia Fauza, Dwi Martani	Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
PPJK-058	Dampak dari Aktivitas Organ Tata Kelola Perusahaan yang Independen terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak	Dr. Oktavia, S.E., M.S.Ak.	Universitas Kristen Krida Wacana

Sesi 6.2

Ruang 3 (Kualitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
CG-033	CSR Sebagai Identitas: Pemaknaan CSR Pada Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik	Muhammad Firman A., Sulastri, M.SA, Yuli Widiastuti, M.Si., Ak, Dhika Maha Putri, M.Acc	Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Malang
AKSR-024	OPTIMALISASI SHARIAH ENTERPRISE THEORY DALAM MENEGAH PRAKTIK RIBA PADA AKAD MURABAHAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)	Suwardi Bambang Hermanto, Saiful Muchlis	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
AKSR-023	KAJIAN PANGROKI [®] ™ DAN PENGKILALAN SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS BIAYA DAN UTANG PIUTANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Pada Acara Ritual Rambu Solo [®] ™ Suku Toraja)	Tetty Indrayani Pasinnong, S., Ak, Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak., CA, Saiful Muchlis	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
AKPM-094	DIMENSI KRITIS PEMIKIRAN AKUNTANSI YANG TERALIASI: DIALOG IMAJINER KONSTRUKSIONIS DAN DEKONSTRUKSIONIS	Akhmad Riduwan, Andayani	STIE Indonesia (STIESIA) Surabaya, STIE Indonesia (STIESIA) Surabaya

Sesi 6.3

Ruang 4 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKPM-013	Pengaruh Intellectual Capital Disclosure dan Financial Disclosure Terhadap Kapitalisasi Pasar (Industry Life Cycle sebagai Variabel Moderasi)	Siti Nafisah Azis, Gagaring Pagalung, Abdul Hamid Habbe	Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin
AKPM-045	Investment Opportunities Set, Board Independence, Free Cash Flow, Earning Management dan Nilai Perusahaan: Suatu Analisis Direct & Indirect Effects	Peter Eka Saputra, Ignatius Roni Setyawan	Maksi FE UNTAR, FE UNTAR
AKPM-023	PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK, MEDIA EXPOSURE, DAN NILAI PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	Diah Ayudita	Universitas Islam Indonesia

Sesi 6.4

Ruang 5 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKPM-022	Pengaruh Adopsi IFRS terhadap Keterbacaan Laporan Tahunan: Studi Empiris Perusahaan Publik Indonesia	Irfan Hidayatullah, Dyah Setyaningrum	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
AKPM-042	Pilihan Metode Revaluasi Aset Tetap dan Penilai Aset Terhadap Biaya Audit: Studi Kasus Perusahaan di Lima Negara ASEAN	Reni Setiani Sujana, Aria Farah Mita	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
AKPM-028	Menelusuri Determinan Voluntary Auditor Switching pada Sektor Jasa Keuangan di Indonesia	Ai Rahmawati, Puji Wibowo	STIE DR Mochtar Thalib, Politeknik Keuangan Negara STAN

Sesi 6.5

Ruang 6 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKPM-050	Pengaruh Masa Jabatan dan Usia CEO Terhadap Terjadinya Manajemen Laba	Fenny Marietza, Nila Aprila, Gusti Rahayu	Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu
AKPM-051	Corporate Social Responsibility, Intellectual Capital dan Corporate Financial Performance	Vivi Pettisyia, Zaky Machmuddah, St. Dwiarto Utomo	Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Dian Nuswantoro
AKPM-053	Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja dan Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	Linda Purwati, Erna Hidayah	Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia

Sesi 6.6

Ruang 7 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKPM-062	Analisis Pengaruh Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Firm Value Pada Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Imastuti Masitoh, Vera Dianty	Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
AKPM-068	Pengaruh Media Exposure terhadap Carbon Emission Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Non Industri Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)	Rika Henda Safitri, Rina Tjandrakirana DP, Anggita Anggraini Rosyada	Universitas Sriwijaya, Universitas Sriwijaya, Universitas Sriwijaya
AKPM-070	Manajemen Laba Pada Kinerja Harga Saham Perusahaan yang Melakukan Right Issue	Bagus Handoko Wicaksono, Ni Ketut Rasmimi	Universitas Udayana, Universitas Udayana

Sesi 6.7

Ruang 8 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKPM-081	Kemampuan Prediktif Laba Agregat dan Komponennya terhadap Pertumbuhan PDB Masa Depan: Suatu Komparasi dalam Setting Internasional	Sari Atmini, Sumiyana	Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada
AKPM-086	Pengaruh Grup Bisnis Terhadap Manajemen Laba Dimoderasi Oleh Kualitas Audit Dan Komite Audit	Pratana Puspa Madiastuty, Siti Munhatay, Eddy Suranta, Rika Lidyah	Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu, Universitas Bengkulu, UIN Raden Fatah Palembang
AKPM-093	Pengaruh Board Gender Diversity terhadap Pembayaran Dividen di Indonesia	Eldinar Isty Fauziah, Agung Nur Probohudono	Universitas Sebelas Maret, Universitas Sebelas Maret

Sesi 6.8

Ruang 8 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKPM-100	DETERMINAN STRUKTUR MODAL PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI	Wahidahwati	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
AKPM-103	Pengaruh Pajak Tanggihan, Perencanaan Pajak, dan Leverage terhadap Manajemen Laba	Franky Afrizal	Universitas Riau
AKPM-109	Pengaruh Mandatory Disclosure dan Voluntary Disclosure Terhadap Analysts Forecast dan Asimetri Informasi Serta Implikasinya Pada Cost of Capital	Novita Indrawati, Ilya Avianti, Poppy Sofia, Nanny Dewi	Universitas Riau, Universitas Padjadjaran, Universitas Padjadjaran, Universitas Padjadjaran

Sesi 6.9

Ruang 10 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKPM-114	Pengaruh Recursive Simultan antara Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pelaporan Pajak: Analisis Dampaknya Pada Daya Informatif Laba	Intan Kurnia Suharti, Dianwicakasih Arieftiara	Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Surabaya
AKPM-135	Pengaruh Intellectual Capital Pada Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2016)	ATIKA NURFAUZIA, Yuni Nustini	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, Universitas Islam Indonesia
AKPM-138	Faktor Determinan Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia	Alan Fauzi, Marfuah	Prodi Akuntansi FE UII Yogyakarta , Prodi Akuntansi FE UII Yogyakarta

Sesi 6.10

Ruang 11 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKPM-142	Penerapan GCG pada kondisi Financial Distress di ASEAN	Kisno, Istianingsih	Universitas Pamulang, Indonesia Banking School
AKPM-145	PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN STRATEGI BISNIS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI	Ivanna Glory Laismono, Lodovicus Lasdi	Unika Widya Mandala Surabaya, Unika Widya Mandala Surabaya
AKPM-147	PENGARUH KOINTEGRASI PASAR MODAL ASEAN, PASAR MODAL ASIA TIMUR, SUKU BUNGA THE FED DAN BI RATE TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI-MENJUAL SAHAM INVESTOR DOMESTIK DAN ASING DI INDONESIA	Elizabeth Lucky Maretha Sitingjak, Yusni Warastuti	FEB Unika Soegijapranata Semarang, FEB FEB Unika Soegijapranata

Sesi 6.11

Ruang 12 (Kuantitatif)

KODE	JENIS PENELITIAN	AFILIASI	PENULIS
AKPM-029	PENURUNAN NILAI ASET JANGKA PANJANG DAN PREDIKSI ARUS KAS MASA DEPAN	Ardimas Rahmadyo, Agung Juliarto	Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro
AKPM-058	Determinan Revaluasi Aset Tetap dan Reaksi Pasar	Rafiud Darajat, Isti Rahayu	Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Indonesia
AKPM-074	ANALISIS PILIHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI NILAI WAJAR ASET TETAP	Ratni Suprapti , Soegeng Soetedjo	Universitas Airlangga
AKPM-116	Earnings Quality under Adopted Accounting Standards and Good Corporate Governance	Rijadh Djatu Winardi, Arizona Mustikarini, Singgih Wijayana	Departemen Akuntansi FEB UGM , Departemen Akuntansi FEB UGM, Departemen Akuntansi FEB UGM

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN, AKUNTABILITAS
DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH
IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Full paper

Nunung Nurhikmah

Pemda Kab. Cirebon
Nunung@gmail.com

Margani Pinasti

Universitas Jenderal Soedirman
Pipi.pinasti@gmail.com

Siti Maghfiroh

Universitas Jenderal Soedirman
firoh.sutanto@gmail.com

Abstract: *Year of 2015 is the starting point of the validity of accrual-based Government Accounting Standart in accordance with Government Regulation No. 71 year of 2010 concerning The Government Accounting Standards. Accrual-based accounting methods provide more comprehensive information because all resource flows are recorded, including internal transactions and other economic flows to provide a more accurate picture of the financial condition of an organization, which is expected to improve the quality of decision making*

This study aims to analyze the differences in financial performance (liquidity ratio, solvency ratio, debt ratio, income growth ratio, the ratio of degrees of decentralization, regional financial independence ratio, the ratio of local revenue effectiveness, expenditure ratio, the ratio of BUMD contribution, operational expenditure ratio, capital expenditure ratio, the ratio of Growth in net cash flows from operating activities, the ratio of Growth in net cash flows from non-financial investment activities, the ratio of Growth in net cash flows from financing activities, the ratio of Growth free cash flow), accountability and transparency of local government financial statements before and after the implementation of government-based accounting standards Accruals. The population in this study are provincial / regency / municipal governments throughout Indonesia as much as 539 provincial / regency / municipal governments throughout Indonesia. The sample was determined using proportionate random sampling technique in which sampling of population members was randomly and proportionally using Slovin formula of 228 samples. Hypothesis test using T test dependent sample.

The empirical results show that (1) hypothesis 1 (financial performance) of 16 hypotheses there are 3 rejected hypotheses, namely; the ratio of degrees of decentralization, the ratio of local revenue effectiveness and the ratio of degrees of contribution of BUMDs showing no difference before and after the Implementation of the accrual-based Government Accounting Standart; There are significant differences in the accountability of financial statements before and after the adoption of accrual-based Government Accounting Standart, (3) there are significant differences in the transparency of financial statements before and after the adoption of accrual-based Government Accounting Standart. The results of the study can provide input for local governments to immediately make improvements and can take for the implementation of accrual-based SAP can run in accordance with the standards to improve financial performance, accountability and transparency in the presentation of financial statements in order to realize clean government and good governance.

Keywords: *Accrual Basis, financial performance, accountability, transparancy*

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN,
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN
KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Full paper

Nunung Nurhikmah
Pemda Kab. Cirebon
Nunung@gmail.com

Margani Pinasti
Universitas Jenderal Soedirman
Pipi.pinasti@gmail.com

Siti Maghfiroh
Universitas Jenderal Soedirman
firoh.sutanto@gmail.com

***Abstract:** Year of 2015 is the starting point of the validity of accrual-based Government Accounting Standard in accordance with Government Regulation No. 71 year of 2010 concerning The Government Accounting Standards. Accrual-based accounting methods provide more comprehensive information because all resource flows are recorded, including internal transactions and other economic flows to provide a more accurate picture of the financial condition of an organization, which is expected to improve the quality of decision making*

This study aims to analyze the differences in financial performance (liquidity ratio, solvency ratio, debt ratio, income growth ratio, the ratio of degrees of decentralization, regional financial independence ratio, the ratio of local revenue effectiveness, expenditure ratio, the ratio of BUMD contribution, operational expenditure ratio, capital expenditure ratio, the ratio of Growth in net cash flows from operating activities, the ratio of Growth in net cash flows from non-financial investment activities, the ratio of Growth in net cash flows from financing activities, the ratio of Growth free cash flow), accountability and transparency of local government financial statements before and after the implementation of government-based accounting standards Accruals. The population in this study are provincial / regency / municipal governments throughout Indonesia as much as 539 provincial / regency / municipal governments throughout Indonesia. The sample was determined using proportionate random sampling technique in which sampling of population members was randomly and proportionally using Slovin formula of 228 samples. Hypothesis test using T test dependent sample.

The empirical results show that (1) hypothesis 1 (financial performance) of 16 hypotheses there are 3 rejected hypotheses, namely; the ratio of degrees of decentralization, the ratio of local revenue effectiveness and the ratio of degrees of contribution of BUMDs showing no difference before and after the Implementation of the accrual-based Government Accounting Standard; There are significant differences in the accountability of financial statements before and after the adoption of accrual-based Government Accounting Standard, (3) there are significant differences in the transparency of financial statements before and after the adoption of accrual-based Government Accounting Standard. The results of the study can provide input for local governments to immediately make improvements and can take for the implementation of accrual-based SAP can run in accordance with the standards to improve financial

performance, accountability and transparency in the presentation of financial statements in order to realize clean government and good governance.

Keywords: *Accrual Basis, financial performance, accountability, transparansi*

1. Pendahuluan

Tahun anggaran 2015 merupakan titik awal berlakunya SAP berbasis akrual, pada akhirnya setelah menunggu sekian lama perubahan akuntansi pemerintahan di Indonesia telah memperoleh legitimasi yang kuat dengan timbulnya kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Simanjuntak, 2005). Ditetapkan dalam lampiran 1.02 PSAP 01 Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwa PSAP berbasis akrual berlaku efektif mulai Tahun Anggaran 2010, dan paling lambat pada tahun anggaran 2015 seluruh entitas pelaporan pemerintah diseluruh pelosok negeri ini wajib melaksanakan dan menerapkan PSAP berbasis akrual.

Metode akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang lebih komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal dan arus ekonomi lainnya sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan suatu organisasi. Sedangkan pada metode akuntansi berbasis kas hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa saat sekarang maupun saat mendatang. Akuntansi berbasis akrual memberikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan basis kas, baik bagi organisasi sendiri sebagai penyusun laporan keuangan maupun bagi pengguna laporan keuangan (Ritonga, 2006).

Namun penerapan SAP berbasis akrual memerlukan upaya keras pemerintah karena jumlah jenis laporan yang bertambah banyak. Dengan standar baru ini, laporan keuangan yang harus disiapkan pemerintah bertambah menjadi tujuh jenis dari basis sebelumnya yang hanya empat jenis. Ketujuh jenis laporan itu meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk menghasilkan laporan-laporan tersebut diperlukan perubahan sistem akuntansi yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual menjadi berbasis akrual, serta penyiapan migrasi saldo-saldo akun neraca untuk mengawali pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual. Apabila hal tersebut tidak dipersiapkan dengan baik, perubahan standar akuntansi ini dapat memengaruhi capaian kualitas pertanggungjawaban APBN/APBD (BPK RI, 2015).

Akuntansi akrual merupakan salah satu bagian dari paket reformasi keuangan negara dan daerah yang berperan penting dalam peningkatan akuntabilitas, efisiensi dan kinerja

pemerintah (Damayanti, 2013), serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang disajikan lebih lengkap, jujur dan objektif (Surepno, 2015). Oleh karena itu, dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta kinerja keuangan daerahnya. Pengadopsian akuntansi akrual dapat meningkatkan akuntabilitas dan sistem penilaian kinerja yang kuat, akuntansi akrual memberikan informasi keuangan yang lebih baik untuk dasar akuntabilitas pemerintah (Ball et al 1999). Selain tuntutan akuntabilitas pertanggungjawaban pemerintah, transparansi pengelolaan keuangan pemerintah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif oleh pemerintah, agar publik memperoleh informasi yang faktual dan aktual agar publik dapat membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan oleh pemerintah, serta untuk menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran (Mahmudi, 2016).

Pada tahun anggaran 2015 secara serentak seluruh entitas pelaporan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai menerapkan SAP berbasis akrual. Pada tahun 2014 terdapat 9 pemerintah daerah di Indonesia yang sudah melaksanakan penerapan SAP berbasis akrual (BPK RI, 2015). Namun berdasarkan hasil LHP atas LKPD Tahun 2014 setelah menerapkan SAP berbasis akrual pada beberapa pemerintah daerah tersebut, justru mengalami penurunan jika dilihat dari capaian perolehan opini audit BPK RI dibandingkan perolehan opini audit BPK RI pada tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Daftar Pemerintah Daerah Yang Telah Menerapkan SAP Berbasis Akrual Sebelum Tahun 2015 & Perolehan Opini BPK RI Atas LKPD TA 2012-2014

NO	PEMERINTAH DAERAH	SAP BERBASIS KAS		SAP BERBASIS AKRUAL	KETERANGAN (OPINI BPK RI SETELAH AKRUAL)
		OPINI BPK RI		OPINI BPK RI	
		2012	2013	2014	
Provinsi Sumatera					
1	Utara: Kab. Labuhanbatu	WDP	WTP	WTP DPP	PENURUNAN
Selatan					
Provinsi Jawa Tengah :					
2	Kab. Banyumas	WTP	WTP	WTP DPP	PENURUNAN
3	Kab. Jepara	WTP	WTP DPP	WTP DPP	TETAP
4	Kab. Temanggung	WTP	WTP	WTP	TETAP

5	Kota Semarang Provinsi Jawa Timur :	WTP (SAP Akrual)	WTP DPP (SAP Akrual)	WDP	PENURUNAN
6	Kab. Banyuwangi Provinsi Banten :	WTP	WTP	WTP	TETAP
7	Kab. Pandeglang	WDP	WDP	TMP	PENURUNAN
8	Kota Tangerang Provinsi	WTP	WTP	WTP	TETAP
9	Kalimantan Barat : Kota Pontianak	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP	TETAP

Sumber : BPK RI (data diolah)

Keterangan :

- WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
- WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
- WDP : Wajar Dengan Pengecualian
- TMP : Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*)

Jika melihat tabel 1 diatas, dari 9 pemerintah daerah yang telah menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun 2014 terdapat hanya 5 pemerintah daerah yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banyuwangi, Kota Tangerang dan Kota Pontianak yang dapat mempertahankan perolehan opini audit BPK RI. Tetapi keadaan sebaliknya terjadi pada 4 pemerintah daerah yang lain, diantaranya Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Banyumas, Kota Semarang justru mengalami penurunan perolehan opini audit BPK RI dari tahun-tahun sebelumnya saat masih menggunakan akuntansi basis kas, bahkan untuk Kabupaten Pandeglang mendapat perolehan opini audit BPK RI “Tidak Memberikan Pendapat/*Disclaimer*”. Dilihat dari perolehan opini audit BPK RI tersebut, 4 dari 9 LKPD mengalami penurunan opini, dimana seharusnya dengan menerapkan SAP berbasis akrual pemerintah daerah dapat meningkatkan pencapaian kinerja keuangan yang lebih baik dengan memperoleh opini audit BPK RI yang lebih baik daripada tahun sebelumnya saat menggunakan SAP berbasis kas atau minimal mempertahankan opini auditnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian Ofoegbu dan Grace (2014) bahwa akuntansi akrual basis akan menjamin akuntabilitas, transparansi dan peningkatan dalam pelaporan keuangan. Seharusnya dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan informasi keuangan yang dihasilkan dari akuntansi berbasis kas. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Damayanti (2013) yang mengutip dari *Public Sector Committee* (2002), bahwa dengan akuntansi akrual dapat memberikan informasi yang

lebih bisa diandalkan karena mampu memberikan informasi tentang kewajiban dan hak yang diterima di masa depan sehingga keputusan ekonomi yang diambil menjadi lebih baik. selain itu juga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual berguna baik untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan.

Fenomena kegagalan penerapan akuntansi akrual juga ditunjukkan dalam penelitian Barton (2004), yang menjelaskan adanya ketidaksesuaian dengan tujuan akuntansi akrual terjadi pada laporan keuangan akrual pemerintah Australia yang menjadi kontroversial, dimana berkurangnya akuntabilitas laporan keuangan sehingga menyebabkan representasi menyesatkan atas hasil keuangan pemerintah Australia. Beechy (2007), mengatakan bahwa penggunaan akuntansi akrual secara penuh pada beberapa organisasi justru dapat mengaburkan akuntabilitas operasi dan transparansi. Carnegie dan Wolnizer (1995), juga berpendapat bahwa secara komprehensif *heritage*, koleksi ilmiah dan budaya tidak memenuhi syarat sebagai aset. Akibatnya, apabila pengakuan dan penilaian aset tersebut menggunakan gaya komersial/sector privat (akrual basis), maka akan menghasilkan informasi yang secara fundamental bertentangan dengan tujuan lembaga pemerintah dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan. Sebaliknya penelitian Rowles (2004) dalam Tickell (2010), menemukan adanya perbedaan informasi yang dihasilkan antara kas basis dan akrual basis, dimana dengan akuntansi berbasis akrual bisa memberikan informasi tentang kinerja keuangan dan posisi sumber daya publik, sedangkan akuntansi berbasis kas tidak bisa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan melihat kondisi implementasi basis akrual yang tidak sesuai dengan beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan (research gap), perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat mengetahui menganalisis apakah terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual dari sisi kinerja keuangan, akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dibandingkan dengan menggunakan SAP berbasis kas.

2. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Kerangka Pemikiran

Konsep *New Public Management* (NPM) merupakan salah satu model reformasi manajemen sektor publik yang sangat berpengaruh di Eropa pada tahun 1990-an dan banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang. *New Public Management* (NPM) adalah filosofi manajemen yang berfokus pada perubahan dalam praktik pengelolaan sektor publik untuk mengikuti praktik swasta, dengan memfokuskan pada akuntabilitas hasil daripada proses

(Upping dan Oliver, 2011). Konsep *New Public Management* telah mereformasi pengelolaan keuangan sektor publik dengan menerapkan manajemen keuangan yang ada pada sektor swasta dalam rangka mencapai efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan sektor publik. Reformasi diwujudkan melalui perubahan pengelolaan keuangan negara dari sistem akuntansi berbasis kas digantikan dengan menerapkan sistem akuntansi akrual yang diadopsi dari sektor swasta. Tujuan perubahan manajemen sektor publik tersebut mengganti sistem dan model pemerintahan lama ke sistem pemerintahan baru yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, demokratisasi, pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel, meningkatkan kinerja, pelayanan publik yang lebih baik dan berkeadilan (Mahmudi, 2015).

Pengadopsian manajemen sektor privat ke dalam sektor publik memotivasi organisasi pemerintah untuk memperoleh legitimasi organisasi di dalam masyarakat, meskipun dalam proses transisi dari SAP berbasis kas menjadi SAP berbasis akrual menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh organisasi pemerintah. Organisasi berupaya memperoleh, memelihara dan memperbaiki legitimasi organisasi dimata para stakeholdernya serta untuk keberlanjutan organisasi (Suchman, 1995). Menurut Deegan et al (2002) legitimasi perusahaan/organisasi akan diperoleh jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan/organisasi, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Sedangkan O'Donovan (2002) berpendapat bahwa legitimasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan/organisasi dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan/organisasi dari masyarakat. Teori legitimasi menyarankan organisasi untuk dapat meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam upaya pemerintah mewujudkan reformasi manajemen sektor publik termasuk perubahan manajemen keuangan pemerintah sebagai implementasi New Publik Manajemen dalam upaya meningkatkan legitimasi, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, untuk menerapkan sistem akrual dalam pengelolaan keuangan baik pada pemerintah pusat maupun daerah paling lambat pada tahun anggaran 2015. Keberhasilan pengadopsian NPM pada organisasi pemerintah dengan melaksanakan SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan memperoleh manfaat dan tujuan atas penerapan SAP berbasis akrual dapat tercapai. Akuntansi berbasis akrual merupakan *international best practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip

New Public Management (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Kemenkeu, 2014).

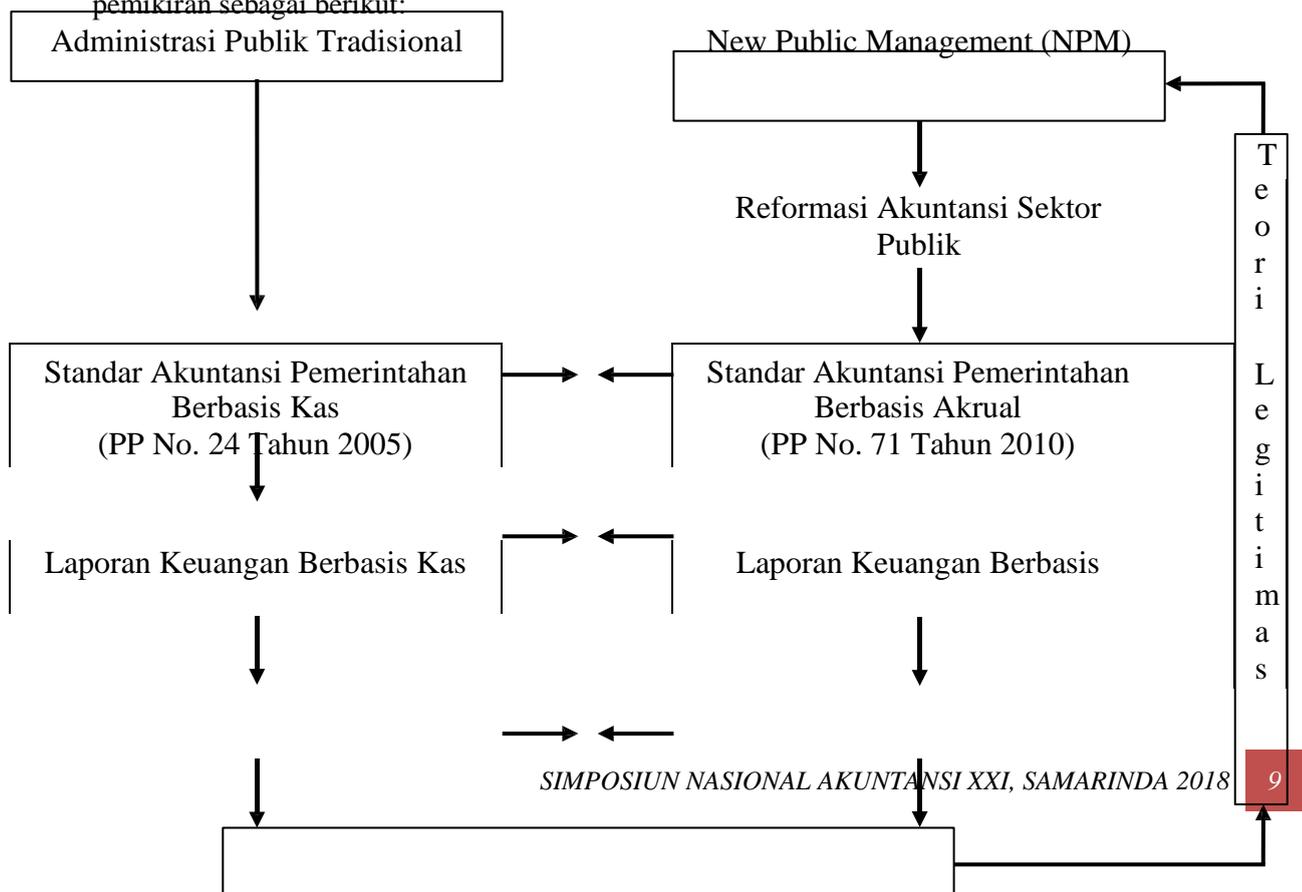
Tujuan pengenalan *accrual basis* ini adalah untuk memfasilitasi transparansi yang lebih besar pada organisasi pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Deloitte (2004) dalam Simanjuntak (2005), menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual akan memberikan informasi yang lebih akurat, sehingga informasi keuangan yang disusun dengan basis akrual akan mempermudah para pemakainya untuk membandingkan secara berimbang antara alternatif dari pemakaian sumber daya, dapat menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas pemerintah. Serta dapat melakukan evaluasi atas kemampuan pemerintah untuk mendanai kegiatannya, dan evaluasi kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya, juga dapat mengevaluasi atas biaya, efisiensi, dan pencapaian kinerja pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat *Federation Des Experts Comptable Europeens/FEE* (2006) yang dikutip oleh Muchsini (2010), bahwa akuntansi akrual untuk pemerintahan memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai kinerja dalam hal pendapatan yang diperoleh dan sumber daya yang dikonsumsi dalam satu periode. Hal ini akan lebih sulit jika menggunakan akuntansi kas karena hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas pada satu periode. Alasan memanfaatkan akrual, karena secara umum sistem akrual dilihat sebagai cara untuk meningkatkan transparansi anggaran, terutama kaitannya dengan kemampuan untuk menghitung aset jangka panjang dan kewajiban, dan juga sebagai alat ukur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah melalui manajemen berbasis kinerja. Selain itu, akuntansi akrual di terapkan untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam system akuntansi berbasis kas.

Dijelaskan oleh Ritonga (2006), bahwa perbedaan mendasar konsep kas basis dan akrual basis dilihat dari dua pilar utama yakni pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya. Konsep pengakuan pendapatan pada kas basis terjadi pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas, menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih, oleh karena itu dalam kas basis muncul adanya metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih. Sedangkan pengakuan pendapatan pada akrual basis terjadi pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan, dalam konsep akrual basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima, sehingga muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab pendapatan sudah diakui padahal kas belum diterima.

Perbedaan utama lainnya adalah konsep pengakuan biaya, dimana pada kas basis pengakuan biaya terjadi pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas. Sedangkan pada akrual basis pengakuan biaya terjadi pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, pada titik ini dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayarkan. Sementara itu, Simanjuntak (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan akuntansi berbasis kas diantaranya kurang informatif, karena hanya berisikan informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas, tidak memberikan informasi tentang aset dan kewajiban. Minimnya informasi mengenai utang pemerintah mempersulit manajemen utang pemerintah termasuk pembayaran cicilan dan bunga. Selain itu juga akuntansi berbasis kas tidak memisahkan secara tegas antara kas yang diperuntukkan untuk belanja operasional dan belanja modal sehingga bisa terjadi pinjaman jangka panjang yang dipergunakan untuk belanja operasional.

Adopsi akuntansi akrual membutuhkan perencanaan yang baik untuk menghindari kegagalan dalam mengimplementasikannya (Damayanti, 2013), agar tujuan penerapan akuntansi akrual untuk meningkatkan kinerja pemerintah (Damayanti, 2013), transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan yang disajikan lebih lengkap, jujur dan objektif (Surepno, 2015) dapat tercapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan konsep akuntansi akrual basis akuntansi kas basis. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat digambarkan alur kerangka

pemikiran sebagai berikut:





Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah

Analisis Kinerja Keuangan

Analisis Kinerja Keuangan i

Akuntabilitas dan Transparansi

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Implementasi

Sistem akuntansi akrual

Ball *et al.* (1999) menyatakan bahwa dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual telah dapat meningkatkan sistem penilaian kinerja pada sistem manajemen keuangan dan akuntansi pemerintah. Hoek (2005), menyatakan bahwa penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di berbagai negara maju telah berhasil dan membawa manfaat antara lain mendukung manajemen kinerja, memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik, memperbaiki pengertian biaya program, memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya, meningkatkan pelaporan keuangan, serta memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset (termasuk Kas).

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Ferryono & Sutaryo (2016) yang menunjukkan bahwa akuntansi basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan dengan basis kas dalam hal penilaian efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, dengan adanya Laporan Operasional (LO) dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Juga bermanfaat untuk penilaian kinerja dan program-program pada organisasi, serta dapat memprediksi arus kas di masa mendatang dimana Laporan Arus Kas (LAK) yang dihasilkan basis akrual lebih bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas). Beberapa penelitian lainnya tentang manfaat/dampak pengimplementasian akuntansi berbasis akrual terhadap kinerja keuangan pada organisasi sektor publik, diantaranya adalah: Diamond (2007), Shonhadji (2009), dan Sari & Putra (2012). Penelitian tersebut menunjukkan dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual pada sektor publik dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi dengan semakin baiknya kualitas informasi keuangan, jadi dengan menggunakan akuntansi akrual basis kinerja keuangan semakin baik dibandingkan dengan menggunakan akuntansi kas basis

Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan pemerintah. Dan salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan (Mahmudi 2016).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis untuk variabel kinerja keuangan berdasarkan perhitungan analisis rasio keuangan sebagai berikut:

H_{1.1}: Terdapat perbedaan rasio likuiditas laporan keuangan pemerintah daerah

antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

H_{1.2}: Terdapat perbedaan rasio solvabilitas laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

H_{1.3}: Terdapat perbedaan rasio utang laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

H_{1.4}: Terdapat perbedaan rasio pertumbuhan pendapatan laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

H_{1.5}: Terdapat perbedaan rasio derajat desentralisasi laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

H_{1.6}: Terdapat perbedaan rasio kemandirian keuangan daerah laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

H_{1.7}: Terdapat perbedaan rasio efektivitas PAD laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

H_{1.8}: Terdapat perbedaan rasio efektivitas pajak daerah laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

H_{1.9}: Terdapat perbedaan rasio efisiensi belanja laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

H_{1.10}: Terdapat perbedaan rasio derajat kontribusi BUMD laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

H_{1.11}: Terdapat perbedaan rasio belanja operasi laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

H_{1.12}: Terdapat perbedaan rasio belanja modal laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

H_{1.13}: Terdapat perbedaan rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas operasi laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah

mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

H_{1.14}: Terdapat perbedaan rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas investasi nonkeuangan laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

H_{1.15}: Terdapat perbedaan rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

H_{1.16}: Terdapat perbedaan rasio pertumbuhan arus kas bebas laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual

2.2. Perbedaan Akuntabilitas Sebelum dan Setelah Implementasi Sistem akuntansi akrual

Laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut (Mardiasmo, 2009). Ball *et al.* (1999) menyatakan bahwa dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam sistem manajemen keuangan dan akuntansi pemerintah telah berhasil meningkatkan akuntabilitas pemerintah dengan memberikan informasi keuangan yang lebih baik dibandingkan basis sebelumnya. Pernyataan tersebut di perkuat oleh penelitian Diamond (2002) bahwa penggunaan akuntansi akrual dapat memperkuat akuntabilitas (*Strengthened accountability*) pemerintah. Ferryono & Sutaryo (2016), menyatakan bahwa akuntansi basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan basis kas dalam memastikan akuntabilitas dan pemenuhan akuntabilitas organisasi, dimana kewajiban entitas pelaporan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada organisasi secara otomatis dapat terpenuhi. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa pengadopsian akuntansi akrual pada sektor publik secara signifikan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan dan penggunaan sumber daya publik. Hal tersebut dinyatakan pada beberapa penelitian, seperti: Bastani *et al.* (2012), Ofoegbu dan Grace (2014). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H₂: Terdapat perbedaan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah antara

sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

2.3. Perbedaan transparansi Sebelum dan Setelah Implementasi Sistem akuntansi akrual

Penelitian Diamond (2002) menyatakan bahwa penggunaan akuntansi akrual pada pemerintah telah memberikan manfaat dalam meningkatkan transparansi total sumber biaya atas aktivitas pemerintahan (*Enhanced transparency on total resource costs of government activities*). Pernyataan di atas didukung oleh penelitian Shonhadji (2009) bahwa dengan menerapkan akuntansi akrual dapat meningkatkan kualitas laporan pemerintah sehingga dapat meningkatkan diversifikasi sistem akuntansi dan kepercayaan dari lembaga keuangan internasional.

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa dengan mengadopsi akuntansi berbasis akrual pada sektor publik, menegaskan adanya peningkatan transparansi, terutama transparansi internal melalui peningkatan alokasi sumber daya. Hal tersebut ditemukan pada penelitian Bastani *et al.* (2012), Ofoegbu dan Grace (2014), dan Wicaksono (2015). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah:

H₃: Terdapat perbedaan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah antara sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data numerik (data kuantitatif) yang dianalisis menggunakan statistik tertentu (Silalahi, 2015). Rancangan penelitian ini adalah penelitian perbedaan yang disebut juga penelitian perbandingan atau komparatif. Penelitian perbedaan/perbandingan adalah penelitian yang akan menjelaskan perbedaan/perbandingan antara dua gejala atau lebih (Silalahi, 2015).

3.1. Sumber Data

Data komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (*Audited*) Tahun Anggaran 2014 dan 2015, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Arus Kas, untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah berdasarkan perolehan Opini Audit BPK RI atas LKPD tahun anggaran

2014 dan 2015. Dalam penelitian ini sumber data sekunder tersebut diperoleh dari Biro Pusat Informasi dan Komunikasi BPK RI di Jakarta.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan data BPK RI, pada tahun anggaran 2014 terdapat 539 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan data BPK RI (IHPS I Tahun 2015), dari 539 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terdapat 9 Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual lebih cepat sebelum tahun anggaran 2015, dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan SAP Berbasis Akrual Sebelum Tahun Anggaran 2015

No	Pemerintah Daerah	Provinsi	Implementasi SAP berbasis Akrual (Tahun)
1	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	2014
2	Kabupaten Banyumas	Jawa Tengah	2014
3	Kabupaten Jepara	Jawa Tengah	2014
4	Kabupaten Temanggung	Jawa Tengah	2014
5	Kota Semarang	Jawa Tengah	2010
6	Kabupaten Banyuwangi	Jawa Timur	2014
7	Kabupaten Pandeglang	Banten	2014
8	Kota Tangerang	Banten	2014
9	Kota Pontianak	Kalimantan Barat	2014

Untuk keperluan analisis, dikarenakan adanya perbedaan waktu pelaksanaan SAP berbasis akrual, maka peneliti mengeluarkan 9 pemerintah daerah tersebut sehingga jumlah populasi menjadi 530 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pengambilan sampel dengan teknik *proportionate random sampling* dari anggota populasi diambil secara acak dengan sistem kocokan dan secara proporsional berdasarkan jumlah pemerintah daerah di masing – masing Provinsi berdasarkan hasil perhitungan rumus Slovin (lampiran 2).

3.3. Definisi Operasional

Tabel 3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi konseptual dan operasional	Subvariabel	Skala
1	Kinerja Keuangan	<p>Definisi konseptual: Kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu organisasi, dapat dilihat dengan menganalisis laporan keuangan organisasi (Mahmudi, 2015).</p> <p>Definisi Operasional: Kinerja keuangan dalam penelitian ini ditunjukkan dari hasil analisis rasio keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).</p>	<p>A. Analisis Rasio keuangan, meliputi: (Mahmudi, 2016)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Likuiditas, menggunakan Rasio Cepat. (menurut Mahmudi (2016), rasio cepat merupakan ukuran likuiditas yang terbaik dibandingkan rasio lancar) 2. Rasio Solvabilitas. 3. Rasio Utang, menggunakan Rasio Utang terhadap Ekuitas. (menurut Mahmudi (2016), rasio utang terhadap aset modal sebenarnya lebih cocok untuk sektor bisnis, tidak begitu relevan untuk sektor publik, sebab pemerintah daerah tidak diasumsikan akan dilikuidasi, karena kreditor pun tidak dapat mengklaim aset modal pemerintah daerah jika terjadi kegagalan dalam membayar utang) 4. Analisis Pertumbuhan Pendapatan 5. Derajat Desentralisasi 6. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 7. Rasio Efektivitas PAD 8. Rasio Efektivitas Pajak Daerah 9. Rasio Derajat Kontribusi BUMD 10. Rasio Efisiensi Belanja 11. Rasio Belanja Operasi 12. Rasio Belanja Modal <p>B. Analisis Laporan Arus Kas, dengan menganalisis pertumbuhan arus kas, meliputi: (Mahmudi, 2016).</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas operasi 14. Rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas investasi nonkeuangan 15. Rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan 16. Rasio pertumbuhan arus kas bebas (<i>Cash Flow Free</i>) 	Rasio
2	Akuntabilitas	<p>Definisi Konseptual: Akuntabilitas merupakan perwujudan kinerja suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan</p>	<p>Pengukuran Opini Audit BPK RI, sebagai berikut: (Atmaja dan Probohudono, 2015).</p> <p>WTP = 5</p>	Ordinal

No	Variabel	Definisi konseptual dan operasional	Subvariabel	Skala
		pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Solihin, 2007).	 WTP-DPP = 4  WDP = 3  TW = 2  TMP = 1	
		<p>Definisi Operasional: Akuntabilitas dalam penelitian ini, diprosikan dengan perolehan Opini Audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014 sampai dengan 2015.</p>		
3	Transparansi	<p>Definisi Konseptual: Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan (<i>clarity</i>) tentang peraturan, undang-undang, dan keputusan pemerintah (Asian Development Bank/ADB, 1999).</p> <p>Wolk et al (2004) dalam Suchemi (2011), menyatakan bahwa pengungkapan laporan keuangan berhubungan dengan keseluruhan informasi yang ada dalam laporan keuangan dan informasi tambahan yang terdiri dari catatan kaki, kejadian setelah tanggal neraca, analisis manajemen dan informasi tambahan lainnya diluar biaya historis</p> <p>Definisi Operasional: Transparansi dalam penelitian ini, diprosikan dengan kecukupan pengungkapan pada LKPD.</p> <p>Dalam penelitian Iqbal, 2016 hasil <i>scoring</i> membuktikan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan wajib LKPD yang memperoleh opini WTP masih rendah yaitu tahun 2013 sebesar 53,79% dan tahun 2014 sebesar 56,14%.</p>	<p>Pengukuran kecukupan pengungkapan informasi LKPD dengan menerapkan teknik <i>scoring</i> atas item-item pengungkapan wajib LKPD yang mengacu pada kriteria <i>Government Compliance Index</i> (GCI) yang dikemukakan oleh Arifin (2014) yang telah dimutakhirkan (d disesuaikan dengan SAP PP 71 Tahun 2010) dalam penelitian Iqbal (2016) kriteria pengungkapan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Keuangan/Fiskal (5 item) 2. Ekonomi Makro (5 item) 3. Target Anggaran Daerah (4 item) 4. Kinerja Keuangan (8 item) 5. Kebijakan Akuntansi (13 item) 6. Item-item Laporan Keuangan (38 item) 7. Informasi Non Finansial (8 item) <p>sistem <i>scoring</i> yang digunakan sebagai berikut: (Iqbal, 2016)</p>  Jika ada = diberi nilai 1  Jika tidak ada = diberi nilai 0	Rasio

3.4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik inferensial. Teknik analisis inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik komparasi untuk menguji perbedaan dari dua kelompok/sampel. Bentuk komparasi dalam penelitian ini adalah komparasi dua sampel yang berpasangan/berkorelasi (dependen). Sebelum dilakukan uji beda, maka dilakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel berdistribusi normal atau tidak normal, hal ini untuk menentukan uji beda yang dapat digunakan apakah uji untuk data parametrik atau nonparametrik. Selain uji normalitas juga dilakukan uji homogenitas, untuk mengetahui apakah kelompok data yang digunakan dalam penelitian memiliki varian atau karakteristik yang sama atau tidak. jika data berdistribusi normal dan memiliki varian data homogen maka data memenuhi syarat untuk dapat menggunakan uji beda *Paired Sample T-Test*. Namun jika salah satu kriteria uji prasyarat tidak terpenuhi, maka uji beda yang dapat digunakan adalah *Wilcoxon Signed Rank Test*. Rincian hasil uji normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan uji homogenitas *Levene Test* masing-masing variabel yang dianalisis disajikan pada lampiran 3. Setelah diketahui hasil uji prasyarat baik uji normalitas maupun uji homogenitas terhadap data variabel kinerja keuangan, 15 dari 16 subvariabel kinerja keuangan uji hipotesis menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test*, sedangkan hanya 1 subvariabel yaitu data rasio belanja operasi merupakan data parametrik dapat menggunakan *Paired Sample T Test*, namun untuk keseragaman hasil maka uji hipotesis terhadap 16 subvariabel kinerja keuangan menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Analisis Data

Pengujian hipotesis variabel kinerja keuangan dilakukan terhadap 16 subvariabel kinerja keuangan menggunakan uji beda/perbandingan *Wilcoxon Signed Rank Test* dikarenakan setelah melalui uji prasyarat menunjukkan sebagai data nonparametric, begitu juga untuk pengujian variabel akuntabilitas dan transparansi juga menggunakan uji beda/perbandingan *Wilcoxon Signed Rank Test*.

Dari hasil pengujian statistik Hipotesis 1, dari 16 sub variabel, semua hipotesis alternative diterima, kecuali untuk sub variabel rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD. Sedangkan hasil uji hipotesis 2 dan 3, hipotesis alternative diterima. Dari hasil pengujian statistik H_2 diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $0,000 < 0,05$, berarti H_a diterima, hasil uji menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Dari hasil uji beda menunjukkan akuntabilitas setelah melaksanakan SAP berbasis akrual rata-rata nilainya 4,03 lebih tinggi dibandingkan rata-rata nilai sebelum melaksanakan SAP berbasis akrual sebesar 3,46. Hasil pengujian statistik hipotesis H_3

terhadap variabel transparansi memperoleh nilai Sig. $0,000 < 0,05$, menunjukkan H_0 diterima, artinya terdapat perbedaan transparansi yang signifikan. Dari hasil uji beda, menunjukkan transparansi setelah melaksanakan SAP berbasis akrual lebih tinggi 60,79% dibandingkan sebelum melaksanakan SAP berbasis akrual hanya 51,81%. Hasil Uji selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 4 – 6.

4.2. Pembahasan Hipotesis

4.2.1. Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Implementasi Akuntansi akrual

Hasil hipotesis H_1 .(Kinerja Keuangan) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio utang, rasio pertumbuhan pendapatan, Rasio pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi belanja, rasio belanja operasi, rasio belanja modal, rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas operasi, rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan, rasio pertumbuhan arus kas bersih aktivitas pembiayaan, dan rasio pertumbuhan arus kas bebas pada laporan keuangan setelah melaksanakan SAP berbasis akrual sebelum melaksanakan SAP berbasis akrual. Secara detail hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Quick Ratio

Hasil penelitian menunjukkan *Quick Ratio* rata-rata tahun 2015 (29 : 1) lebih rendah dari rata-rata tahun 2014 (281: 1)(Mahmudi, 2016). Artinya pemerintah daerah secara keuangan masih tetap likuid, pemerintah daerah masih memiliki kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya tetapi tidak sebaik tahun sebelumnya ketika belum menerapkan basis akrual. Hal ini terjadi pada tahun 2015 setelah berbasis akrual nilai utang lancar dicatat lebih tinggi karena, adanya pengakuan beban operasional atau transaksi rutin sebagai kewajiban yang harus diakui dan dicatat sebagai utang karena aktivitas/peristiwa/beban sudah terjadi sebelum kas dibayarkan.

2. Rasio Solvabilitas

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata rasio solvabilitas sebelum SAP berbasis akrual (1624 : 1) lebih besar daripada rata-rata rasio solvabilitas sesudah SAP berbasis akrual (322 : 1) (Mahmudi, 2016). Hal ini berarti pemerintah daerah dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 sesudah berbasis akrual diterapkan, nilai total utang menjadi lebih besar karena salah satu komponen utang yaitu utang lancar diantaranya utang tagihan listrik, telepon, utang asuransi, utang pajak kendaraan

bermotor, utang PFK (perhitungan pihak ketiga) atas pelayanan kesehatan di unit kesehatan swasta, dan lain sebagainya, dicatat lebih besar setelah akrual karena semua peristiwa yang menimbulkan kewajiban atas jasa/barang atas beban rutin/operasional atas aktivitas pemerintah yang telah diberikan oleh pihak lain harus diakui dan dicatat sebagai utang lancar ke dalam neraca. Karena nilai utang lancar semakin besar maka nilai total utang pun menjadi semakin besar, oleh karena nilai total utang sebagai penyebut yang lebih besar maka nilai rasio solvabilitas pada tahun 2015 (basis akrual) menjadi lebih kecil dibandingkan rasio solvabilitas pada tahun 2014 saat basis kas.

3. Rasio Utang

Hasil penelitian menunjukkan rasio utang setelah menerapkan SAP berbasis akrual sebesar 0,02 : 1 lebih tinggi dibandingkan saat basis kas sebesar 0,01 : 1. Hal ini disebabkan pada basis akrual selain kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima, juga pada saat kewajiban timbul karena adanya beban operasional atas aktivitas pemerintah baik berupa barang atau jasa yang telah diberikan oleh pihak ketiga yang belum dibayarkan harus dicatat sebagai kewajiban/utang lancar, sehingga nilai total utang dalam neraca dengan basis akrual disajikan lebih besar dibandingkan total utang pada basis kas. Berbeda dengan basis kas sebelumnya nilai total utang tentu terlihat lebih kecil karena belum adanya pengakuan dan pencatatan atas terjadinya penyerahan manfaat baik barang atau jasa yang bersifat rutin/operasional tersebut oleh pihak ketiga kepada pemerintah. Rasio utang yang tinggi menunjukkan semakin besar ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan utang, dan adanya peningkatan resiko bagi kreditor dalam memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah. Meskipun setelah menerapkan basis akrual rasio utang terlihat lebih besar, namun hal tersebut sebenarnya semakin memperlihatkan kondisi keuangan pemerintah yang sebenarnya.

4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Penelitian dilakukan dengan membandingkan nilai pendapatan LRA dengan nilai pendapatan LO, hasil menunjukkan adanya perbedaan, dimana rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan sesudah menerapkan basis akrual pada tahun 2015 sebesar 18,76% lebih tinggi dibandingkan sebelum akrual yakni sebesar 13,85%, data menunjukkan nilai pendapatan LO lebih besar dibandingkan nilai pendapatan LRA. Hal ini sebagaimana PSAP No. 2 PP No. 71 Tahun 2010 SAP berbasis akrual, menyebutkan bahwa meskipun secara umum sistem akuntansi yang digunakan adalah basis akrual, tetapi untuk laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas, dimana pendapatan-LRA hanya mengakui dan mencatat pendapatan daerah yang telah masuk ke

rekening kas daerah dan berdasarkan pendapatan yang telah dianggarkan saja. Padahal disisi lain pemerintah masih memiliki pendapatan yang sudah menjadi hak pemerintah daerah yang masih dapat ditagih dan menjadi penambah pendapatan daerah tetapi belum disetorkan ke kas daerah. Oleh karena itulah nilai pendapatan-LO secara umum dapat dikatakan lebih besar dan lebih memperlihatkan nilai pendapatan daerah yang sebenarnya diperoleh pemerintah daerah dalam satu periode berjalan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ferryono dan Sutaryo (2016) yang mengatakan bahwa basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan basis kas untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

5. Rasio Kemandirian Keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan nilai PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah baik pinjaman dari dalam atau luar negeri. Rasio ini mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah (Halim, 2012). Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sesudah SAP berbasis akrual sebesar 17,77% lebih tinggi dari rasio tahun sebelumnya yakni sebesar 16,57%. Pada tahun 2015 jika dilihat dari laporan operasional, nilai penerimaan PAD mengalami peningkatan, dalam basis akrual ini pemerintah dapat melihat kemampuan daerah yang sebenarnya, nilai PAD-LO selain menggambarkan PAD yang telah direalisasikan juga memperlihatkan besaran PAD yang masih dapat diperoleh pemerintah daerah meskipun dananya belum diterima oleh kas daerah. Hasil analisis menunjukkan secara umum nilai PAD pada laporan operasional cenderung lebih besar dibandingkan dengan nilai PAD pada laporan realisasi anggaran. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan basis akrual telah mendorong kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerahnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ferryono dan Sutaryo (2016) yang mengatakan bahwa basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan basis kas untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

6. Rasio Efektivitas

Dari hasil penelitian nilai rata-rata rasio efektivitas pajak daerah sesudah melaksanakan SAP berbasis akrual sebesar 111,88%, lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 sebelum menerapkan SAP berbasis akrual mencapai 110,64%. Dari nilai rasio efektivitas pajak daerah baik sebelum maupun sesudah penerapan basis akrual tergolong dalam kategori sangat efektif karena $> 100\%$.Penerimaan dari sektor pajak daerah sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar tentunya sangat mempengaruhi jumlah penerimaan PAD, untuk itu dengan basis akrual ini dapat memperbaiki pengelolaan pajak daerah yang lebih baik, dimana perencanaan penerimaan pajak daerah baik tanpa melalui penetapan maupun penerimaan pajak dengan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pada basis akrual penerimaan pajak lebih terukur berapa jumlah yang telah terealisasi dan diterima di kas daerah, berapa jumlah yang menjadi piutang pendapatan pajak, dan berapa jumlah estimasi piutang yang tak tertagih, dimana pada basis kas tidak mengenal adanya piutang tak tertagih. Pada basis akrual informasi pendapatan dinilai lebih tinggi karena meskipun kasnya belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan, adanya peningkatan penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah secara rinci dapat dilihat dalam laporan operasional, sementara pada basis kas hanya mencatat penerimaan pajak daerah hanya berdasarkan jumlah kas yang telah masuk ke rekening daerah saja, tidak mengakui pendapatan manakala kasnya belum diterima.

7. Rasio Efisiensi Belanja

Dari hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata rasio efisiensi belanja pada tahun 2015 sesudah melaksanakan SAP berbasis akrual sebesar 95,49%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata rasio efisiensi belanja sebelum melaksanakan SAP berbasis akrual sebesar 88,41% pada tahun 2014. Laporan realisasi anggaran hanya mengakui dan mencatat transaksi belanja berdasarkan pengeluaran dari rekening kas daerah saja, sedangkan pada basis akrual, dalam laporan operasional mengakui dan mencatat beban atas timbulnya kewajiban atas transaksi/peristiwa yang sudah diterima oleh pemerintah namun belum ada pengeluaran dari kas daerah seperti adanya tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan asuransi, tagihan pajak STNK, beban yang timbul atas konsumsi aset seperti beban persediaan ATK, obat, serta beban yang diakibatkan karena adanya penurunan manfaat ekonomi nilai aset seperti beban penyusutan, pengeluaran atas kewajiban tersebut diakomodir dalam laporan operasional. Pada beban-LO semua pengeluaran operasional daerah sebagai kewajiban daerah diakui dan dicatat meskipun secara kas belum dikeluarkan dari kas daerah. Sehingga dalam laporan operasional terlihat nilai beban

operasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai belanja daerahnya, hal ini terjadi karena nilai belanja yang direalisasikan tidak terpengaruh dengan transaksi yang sifatnya akrual, seperti tagihan-tagihan listrik, telepon, PDAM, beban bunga, asuransi yang sifatnya rutin dan tidak bisa ditunda.

8. Rasio Belanja Operasi

Dari hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata rasio belanja operasi tahun 2015 setelah menerapkan SAP berbasis akrual sebesar 76,55% lebih tinggi dibandingkan sebelum menerapkan SAP berbasis akrual rata-rata rasio belanja operasi tahun 2014 sebesar 73,83%. Meskipun dalam pelaksanaan anggaran menggunakan basis kas, belanja operasi yang merupakan belanja rutin untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah tentu sangat terpengaruh oleh basis akuntansi yang digunakan. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, untuk transaksi yang pembayarannya telah dikeluarkan dari kas daerah diakui dan dicatat pada akun belanja dalam laporan realisasi anggaran. Berbeda dengan laporan operasional selain mengakui dan mencatat transaksi yang pembayarannya telah dikeluarkan dari kas daerah, juga mengakui dan mencatat setiap transaksi atas beban berdasarkan terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kewajiban. Sehingga nilai nominal beban yang dicatat pada laporan operasional lebih besar, namun menunjukkan jumlah beban rutin pemerintah yang sebenarnya terjadi pada periode berjalan. Pada basis kas tidak mengakui beban sebelum pembayaran dilakukan, meskipun transaksi telah dilakukan pada periode yang sama. Sedangkan basis akrual selain adanya perbedaan pengakuan pendapatan, juga terdapat perbedaan dalam pengakuan biaya dibandingkan basis kas, dimana dengan basis akrual beban diakui pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, seperti adanya beban penyusutan karena konsumsi aset, atau saat transaksi/peristiwa operasional dalam menjalankan kegiatan rutin pemerintah seperti beban tagihan listrik dan lain-lain. Oleh karena itulah informasi nilai nominal beban operasi pada basis akrual menjadi lebih tinggi pada laporan operasional dibanding nilai realisasi belanja operasi pada laporan realisasi anggaran, selain itu laporan operasional juga lebih mencerminkan nilai beban yang dikeluarkan sebenarnya dalam membiayai kegiatan rutin pemerintah daerah selama satu periode anggaran.

9. Rasio Belanja Modal

Dilihat dari hasil penelitian nilai rata-rata rasio belanja modal sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada tahun 2014 sebesar 24,09% mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 25,48%. Alokasi belanja modal pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh nilai pendapatan daerahnya, dengan tingkat pendapatan daerah

yang tinggi maka alokasi untuk belanja modal pun akan semakin besar, karena akan mempengaruhi nilai aset pada neraca pemerintah daerah, baik yang dikapitalisasi sebagai aset tetap maupun aset lancar. Dengan menerapkan basis akrual nilai pendapatan yang diakui dan dicatat lebih tinggi dibandingkan dengan pengakuan pendapatan dengan basis kas, karena pengakuan pendapatan daerah pada basis akrual lebih bersifat realtime berdasarkan terjadinya peristiwa/transaksi tanpa memperhatikan apakah secara kas sudah diterima kas daerah atau belum. Sehingga dengan penerapan basis akrual ini secara tidak langsung telah meningkatkan alokasi dan realisasi belanja modal.

10. Rasio Pertumbuhan Arus kas bersih dari aktivitas operasi

Analisis ini membandingkan pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2014 dengan pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2015. Analisis penelitian menghasilkan nilai rata-rata pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2014 sebelum menerapkan SAP berbasis akrual bersaldo positif dengan rasio sebesar 21,05%, sedangkan pada tahun 2015 setelah menerapkan SAP berbasis akrual menurun 10,61% menjadi sebesar 10,44%. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih dari nilai pendapatan (pendapatan-LRA dan pendapatan-LO) dikurangi nilai belanjadan beban operasi. Arus kas masuk untuk aktivitas operasi mencatat pendapatan yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, sedangkan arus kas keluar untuk aktivitas operasi mencatat belanja dan beban operasi, pengeluaran (belanja) transfer dan belanja tidak terduga. Meskipun secara nilai pertumbuhan dari tahun 2015 ke 2014 mengalami penurunan, sebenarnya nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi setiap tahunnya mengalami kenaikan dan bertanda positif mengindikasikan pemerintah daerah memiliki kinerja keuangan yang baik karena menunjukkan pemerintah daerah mampu menghasilkan kas untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber dana dari luar. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ferryono dan Sutaryo (2016) yang mengatakan bahwa basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan basis kas untuk penilaian kinerja dan program pada organisasi, serta dapat memprediksi arus kas di masa mendatang dan bermanfaat untuk penyiapan anggaran.

11. Rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan

Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas investasi nonkeuangan sebelum melaksanakan SAP berbasis akrual bersaldo negatif dengan rasio sebesar 16,58% meningkat 8,74% menjadi 25,32% pada tahun 2015 setelah melaksanakan SAP berbasis akrual. Pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas investasi

pada tahun 2015 lebih tinggi dari tahun 2014, karena memang adanya pertumbuhan aktivitas investasi dari belanja modal, juga karena pada akun arus kas keluar untuk aktivitas investasi hanya mencatat nilai belanja modal dari laporan realisasi anggaran saja dimana belanja modal hanya dicatat dan diakui berdasarkan basis kas sesuai yang direalisasikan saja. Sehingga pada tahun 2015 saat basis akrual diterapkan pertumbuhan aktivitas investasipun menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Selain itu nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi pada tahun 2014 dan 2015 bersaldo negatif menggambarkan adanya kegiatan penambahan aset tetap yang lebih besar dibandingkan perolehan kas dari hasil penjualan/pelepasan aset tetap. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hoek (2005), yang mengemukakan pendapat bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual diberbagai negara maju memberi manfaat antara lain memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset.

12. Rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan

Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan pada tahun 2014 sebelum menerapkan SAP berbasis akrual rasio rata-rata 202% mengalami peningkatan 433% menjadi sebesar 635% pada tahun 2015 setelah menerapkan SAP berbasis akrual. Secara tidak langsung sistem berbasis akrual telah meningkatkan pengelolaan penerimaan daerah terutama berkaitan terhadap sistem pengakuan dan pencatatan pendapatan daerah, karena dengan penerapan basis akrual tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memperbaiki dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah serta menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan PAD agar dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pinjaman/utang baik pinjaman dari dalam maupun luar negeri. Peningkatan pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan juga menunjukkan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar pokok utang jangka panjang serta peningkatan dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan daerah/pihak swasta untuk peningkatan ekonomi daerah.

13. Rasi pertumbuhan arus kas bebas

Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata rasio arus kas bebas pada tahun 2015 sebesar -133,5%, sedangkan rata-rata arus kas bebas pada tahun 2014 sebesar 25,75%. Arus kas bebas pada tahun 2014 bertanda positif sebesar 25,75% artinya terdapat kelebihan kas bebas karena aktivitas investasi (belanja modal dan pengeluaran pembiayaan untuk investasi seperti penyertaan modal pada bank daerah) pemerintah daerah lebih kecil dibandingkan aktivitas operasinya (belanja operasi) sehingga terdapat

kelebihan kas bebas (surplus), hal ini terjadi karena penerimaan pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerahnya. Kelebihan kas tersebut dapat digunakan sebagai dana cadangan, melunasi utang atau untuk menambah investasi daerah dalam bentuk penyertaan modal. Sedangkan pada tahun 2015 turun 107,75% menjadi -133,5%, nilai arus kas bebas negatif artinya tidak ada kelebihan kas bebas, hal ini terjadi karena aktivitas investasi (belanja modal dan pengeluaran pembiayaan untuk investasi seperti penyertaan modal pada Bank daerah) pemerintah daerah pada tahun 2015 lebih besar dari aktivitas operasinya (belanja operasi), meskipun pemerintah daerah tidak memiliki ketersediaan kas bebas hal tersebut bukan berarti penerimaan pendapatan daerah juga rendah, melainkan karena penerimaan pendapatan daerah yang tinggi mendorong untuk menaikkan alokasi belanja daerahnya untuk meningkatkan fasilitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Seangkan Hasil hipotesis H_{1.5}, H_{1.7} dan H_{1.10} ditolak. Tidak terdapat perbedaan rasio derajat desentralisasi. Rasio Efektivitas PAD dan rasio derajat kontribusi BUMD pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual tidak berbeda dengan sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual. Secara detail hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Penggunaan analisis rasio derajat desentralisasi bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, dimana semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Hasil pengujian secara statistik menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan, dilihat dari nilai rata-rata rasio derajat desentralisasi terdapat penurunan dimana nilai rata-rata rasio derajat desentralisasi setelah mengimplementasikan SAP berbasis akrual sebesar 11,43% sedangkan sebelumnya sebesar 11,26%, pengujian menunjukkan meskipun mengalami peningkatan sebesar 0,17% tetapi tidak berbeda signifikan. Analisis dilakukan dengan membandingkan nilai pendapatan PAD LRA tahun 2014, dengan pendapatan PAD LO tahun 2015. Dengan SAP berbasis akrual ini PAD yang belum disetorkan akan dicatat dan diakui sebagai pendapatan-LO pada laporan operasional, sehingga dapat diketahui total potensi pendapatan asli daerah yang sebenarnya, yang dapat dijadikan dasar estimasi yang lebih akurat dalam penetapan anggaran pendapatan asli daerah pada periode selanjutnya, karena jenis pendapatan daerah tertentu sebelum pelaksanaan anggaran terlebih dahulu dapat dibuat penetapan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD) untuk potensi pajak daerah seperti pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, PBB perkotaan dan pedesaan, BPHTB dan lain sebagainya. Serta penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk potensi retribusi daerah seperti retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat rekreasi, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dimana dengan ditetapkannya SKRD dan SKPD, maka pemerintah daerah memiliki dasar untuk penagihan PAD kepada pihak ketiga sekaligus dapat mengawasi piutang yang belum ditagihkan, sehingga proses penganggaran pendapatan asli daerah pada tahun berikutnya dengan lebih terukur tidak lagi hanya menaikkan pada kisaran 10-20% saja. Dengan adanya SKPD dan SKRD tersebut juga pemerintah daerah dapat mengetahui nilai potensi pendapatan daerah yang akan diterima pada periode berjalan sebagai sumber daya yang dimiliki daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi di daerah. Dari hasil analisis dapat dikatakan bahwa meskipun basis pencatatan telah melaksanakan akrual belum dapat mendorong secara maksimal dalam meningkatkan kinerja pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi masih sangat bergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

2. Rasio Efektivitas PAD

Dalam penelitian ini membandingkan nilai pendapatan asli daerah pada laporan operasional dengan jumlah anggarannya, hasilnya menunjukkan nilai rata-rata rasio efektivitas PAD pada tahun 2015 sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual sebesar 108,04% lebih kecil dibandingkan rata-rata rasio efektivitas PAD tahun 2014 sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual yakni sebesar 111,66%, namun nilai rasio efektivitas PAD baik sebelum maupun sesudah menerapkan basis akrual tergolong dalam kategori sangat efektif karena $> 100\%$. Penurunan rasio efektivitas PAD sebesar 3,62% pada tahun 2015 tersebut dapat dijelaskan bahwa seharusnya beberapa potensi penerimaan PAD daerah dapat terlebih dahulu dilakukan penetapan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk potensi pajak daerah seperti pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, PBB perkotaan dan pedesaan, dan BPHTB, serta penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk potensi retribusi daerah seperti retribusi jasa usaha tempat khusus parkir, retribusi jasa usaha tempat rekreasi, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair dan lain sebagainya. Dengan ditetapkannya SKRD dan SKPD tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar untuk melakukan penagihan PAD kepada pihak ketiga sekaligus dapat mengawasi piutang-piutang yang belum ditagihkan, sehingga target penerimaan PAD dapat direalisasikan atau bahkan melebihi pagu

anggaran. Oleh karena itu dengan mengetahui jumlah penerimaan PAD yang masih belum dapat tertagih, juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan target anggaran PAD untuk tahun berikutnya dengan lebih akurat dan terukur karena informasi PAD pada laporan operasional memperlihatkan nominal PAD sebenarnya yang dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan pada basis SAP sebelumnya, pendapatan hanya akan diakui dan dicatat sebagai penerimaan PAD jika secara fisik kas sudah diterima oleh kas daerah, padahal masih banyak potensi pajak dan retribusi baik melalui penetapan SKRD dan SKPD ataupun tidak, yang manfaatnya sudah diberikan kepada pihak lain atau dengan kata lain transaksi/peristiwa sudah terjadi, namun pemerintah tidak dapat mencatatnya sebagai pendapatan karena belum diterima kasnya. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Ferryono dan Sutaryo (2016) yang mengatakan bahwa basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan basis kas untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

3. Derajat Kontribusi BUMD

Dari hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata rasio derajat kontribusi BUMD setelah mengimplementasikan SAP berbasis akrual tahun 2015 sebesar 6,11%, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebesar 6,55% sebelum SAP akrual basis diterapkan. Penerimaan laba dari perusahaan daerah nilainya relatif lebih kecil dibandingkan dengan sumber penerimaan PAD yang lain, namun hal ini tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, karena adanya aset yang diinvestasikan pemerintah pada perusahaan daerah yang harus diawasi dalam pengelolaannya agar perusahaan daerah dapat memberikan hasil/laba yang optimal sebagai sumber penerimaan PAD atas aset yang sudah diinvestasikan. Dengan penerapan basis akrual diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk menggali sumberdaya-sumberdaya daerah untuk dapat menaikkan penerimaan pendapatan asli daerah, namun hal tersebut belum memberikan dampak yang signifikan atas pengelolaan perusahaan daerah dalam meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah

4.2.2. Perbedaan Akuntabilitas Sebelum dan Setelah Implementasi Akuntansi akrual

Dari hasil pengujian statistik H_2 , dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan akuntabilitas sebelum dan setelah implementasi akuntansi akrual. Hal tersebut sejalan dengan hasil perolehan opini audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual, terdapat 133 pemerintah

daerah yang memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sesudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada tahun anggaran 2015 meningkat hingga 151% dibandingkan pada tahun anggaran 2014 hanya 53 pemerintah daerah. Sedangkan jumlah opini WDP setelah menerapkan SAP berbasis akrual menurun 33% dari semula 118 menjadi 79 pemerintah daerah.

Konsep *New Public Management* telah mendorong pemerintah mengadopsi *best practice* pada sektor swasta ke dalam sektor pemerintah melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sesuai PP No. 71 Tahun 2010 dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Hal ini juga salah satu untuk menjawab tuntutan publik kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan sumber daya publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dalam teori legitimasi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Diamond (2002), Ball *et al.* (1999), Bastani *et al.* (2012), Ofoegbu dan Grace (2014) yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi akrual dapat memperbaiki akuntabilitas pelaporan keuangan yang buruk pada sektor publik. Serta mendukung penelitian Ball *et al.* (1999), yang menyatakan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam sistem manajemen keuangan dan akuntansi pemerintah telah berhasil meningkatkan akuntabilitas pemerintah dengan memberikan informasi keuangan yang lebih baik dibandingkan basis sebelumnya. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Barton (2004) yang menyatakan penerapan akuntansi akrual menyebabkan representasi yang menyesatkan atas hasil pengelolaan keuangan pada sektor publik.

4.2.3. Perbedaan Transparansi Sebelum dan Setelah Implementasi Akuntansi akrual

Hasil pengujian statistik hipotesis H_3 terhadap variabel transparansi memperoleh nilai Sig. $0,000 < 0,05$, menunjukkan H_a diterima, artinya terdapat perbedaan transparansi yang signifikan. Dari hasil pengujian pada tabel 4.2, perbedaan menunjukkan transparansi setelah melaksanakan SAP berbasis akrual lebih tinggi 60,79% dibandingkan sebelum melaksanakan SAP berbasis akrual hanya 51,81%. Hasil pengukuran keterbukaan informasi laporan keuangan dengan menggunakan kriteria *Government Compliance Index* (GCI) yang telah dimutakhirkan (Iqbal, 2016) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2014 sebelum akrual dan 2015 sesudah akrual. Rata-rata tingkat pengungkapan wajib terhadap item-item pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah setelah menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun anggaran 2015 mencapai 60,79% lebih tinggi. Penyajian

informasi yang diungkapkan pada setiap pos dalam laporan keuangan berbasis akrual, tingkat pengungkapan wajibnya meningkat sebesar 17,33% dibandingkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pada tahun 2014 saat berbasis kas hanya sebesar 51,81%. Dimana pengungkapan dalam laporan keuangan tahun 2014, masih belum menjelaskan secara rinci pada setiap pos transaksi hanya sebatas menarasikan angka-angka tanpa disertai penjelasan yang mengungkapkan kenaikan atau penurunan nilai di setiap pos transaksi. Hasil pengukuran ini lebih tinggi dari hasil penelitian Iqbal (2016) yang melakukan pengukuran tingkat pengungkapan wajib terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP pada tahun anggaran 2013 dan 2014 dimana tingkat pengungkapan wajibnya sebesar 53,79% dan 56,14%.

Hasil penelitian menunjukkan keterbukaan informasi keuangan yang disajikan melalui pengungkapan wajib dalam penyajian laporan keuangan yang berbasis akrual lebih baik dibandingkan sebelumnya, ini menunjukkan SAP berbasis akrual telah dapat meningkatkan transparansi dengan penyajian informasi pengungkapan wajib yang lebih rinci dan lebih detail pada setiap pos transaksi di dalam catatan atas laporan keuangan baik dengan penjelasan yang lengkap untuk setiap akun/pos.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

5.1. Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio utang, rasio pertumbuhan pendapatan, Rasio pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi belanja, rasio belanja operasi, rasio belanja modal, rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas operasi, rasio pertumbuhan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan, rasio pertumbuhan arus kas bersih aktivitas pembiayaan, dan rasio pertumbuhan arus kas bebas pada laporan keuangan setelah melaksanakan SAP berbasis akrual sebelum melaksanakan SAP berbasis akrual.
2. Tidak terdapat perbedaan rasio derajat desentralisasi. Rasio Efektivitas PAD dan rasio derajat kontribusi BUMD pada laporan keuangan yang telah mengimplementasikan SAP berbasis akrual tidak berbeda dengan sebelum mengimplementasikan SAP berbasis akrual.
3. Terdapat perbedaan akuntabilitas sebelum dan setelah mengimplementasi SAP berbasis akrual
4. terdapat perbedaan akuntabilitas sebelum dan setelah mengimplementasi SAP berbasis akrual.

5.2 Implikasi

1. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memberikan gambaran bagi semua pihak yang terkait, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan implementasi SAP berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan. Dalam hal ini agar pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan serta dapat mengambil strategi atau keputusan terbaik sehingga implementasi SAP berbasis akrual dapat berjalan sesuai dengan standar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dapat menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan, akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan dalam rangka mewujudkan *clean government and good governance*.
2. Secara teoritis, sebagai khazanah ilmu pengetahuan dalam hal perkembangan sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Atmaja, RM Syah Arief., dan Agung Nur Probodhono. 2015. Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidapatuhan dan Kerugian Negara. *Integritas Jurnal Antikorupsi*, Volume 1 Nomor 1, November 2015.
- Ball, Ian., Dale, Tony., Eggers, William D., and Sacco, John. 1999. Reforming Financial Management in The Public Sector : Lessons U.S. Officials Can Learn From New Zealand. *Public Study* No. 258.
- Barton, Allan D. 2004. How To Profit From Defence A Study In The Misapplication Of Business Accounting To The Public Sector In Australia. *Financial Accountability & Management*, 20 (3), August 2004, 0267-4424.
- Bastani, Peivand., Abolhadj, Masoud., Molania, Hamid., and Ramezian, Maryam. 2012. Role of Accrual Accounting in Report Transparency and Accountability Promotion in Iranian Public Health Sector. *Journal of Scientific Research* 12 (8) : 1097-1101, ISSN 1990-9233.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Beechy, Thomas H. 2007. Does Full Accrual Accounting Enhance Accountability?. *The Innovation Journal :The Public Sector Innovation Journal*, Volume 12 (3), article 4.
- BPK-RI, Pendapat BPK. 2015. Kesiapan Pemerintah Dalam Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015. <http://pontianak.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/12/Pendapat-BPK-November-2015-Akuntansi-Berbasis-Akrual.pdf>, diakses pada 22 Juni 2016.
- Damayanti, Ratna Ayu. 2013. Akuntansi Akrual dan Penerapannya di Sektor Publik : Sebuah Agenda Pembaruan. Modul Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual - Konsep, Pemikiran dan Implementasi di Indonesia, BPKP dan Star BPKP. <http://ratnatrenggalek-accounting.com/wp-content/uploads/2016/03/Modul-Gabungan-Penerapan-Akuntansi-Sektor-Publik-Berbasis-Akrual-di-Indonesia.pdf>, diakses pada 29 Juni 2016.
- Deegan, Craig., Rankin, Michaela., and Tobin, John. 2002. An Examination Of The Corporate Social And Environmental Disclosures Of BHP From 1983-1997 A Test Of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 15 No. 3, 2002. Pp. 312-343.
- Diamond, Jack. 2002. Performance Budgeting – Is Accrual Accounting Required?. International Monetary Fund (IMF) Working Paper.WP/02/240.
- Dowling, John dan Pfeffer, Jeffrey. 1975. Organizational Legitimacy : Social Values And Organizational Behavior. *The Pasific Sociological Review*, Vol. 18, No. 1 (Jan., 1975), pp. 122-136.

- Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ferryono, Baries dan Sutaryo. 2016. Manfaat Basis Akrua dan Basis Kas Menuju Akrua Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung, 2016.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah SAP Berbasis Akrua*. Edisi Keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Harry Azhar Azis, Ketua BPK RI. 2016. Sambutan Ketua BPK RI pada saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2015 Kepada Pimpinan DPR RI dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 2 Juni 2016. <http://www.bpk.go.id/news/lkpp-tahun-2015-yang-berbasis-akrua-memperoleh-predikat-wdp>. Di akses pada 22 Juni 2016.
- Hidayat, Anwar. 2014., <http://www.statistikian.com/2014/08/wilcoxon-signed-rank-test.html>. diakses pada 19 September 2016.
- Hoek, Peter Van Der. 2005. Accrual Based Budgeting and Accounting in the Public Sector : The Dutch Experience. *MPPA Paper* No. 5906, posted 29 November 2007.
- Hood, Christopher. 1991. A Public Management for All Seasons?. *Public Administration* Vol. 69 (3-19). ISSN 0033-3298.
- International Federation of Accountants (IFAC). 2012. *Public Sector Financial Management Transparency and Accountability : The Use of International Public Sector Accounting Standards*.
- Irawan, Arief Surya. 2013. Analisis Pengaruh Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Atas Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah. Modul Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua - Konsep, Pemikiran dan Implementasi di Indonesia, BPKP dan Star BPKP. <http://ratmatrengalek-accounting.com/wp-content/uploads/2016/03/Modul-Gabungan-Penerapan-Akuntansi-Sektor-Publik-Berbasis-Akrua-di-Indonesia.pdf>, diakses pada 29 Juni 2016.
- Irawan, Bambang. 2012. Faktor-faktor Yang Menjadi Basis Legitimasi Dalam Pelayanan Publik.
- Iqbal, Mohamad. 2016. Apakah Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dipertimbangkan dalam Formulasi Opini BPK?. *Tesis*. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan RI. 2014, Modul gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrua, Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat. <http://www.btklsby.go.id/wp-content/uploads/2010/01/1-Materi-Gambaran-Umum-150414.pdf>, diakses pada 29 Juni 2016.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Agustus 2003.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Muchsini, Binti. 2010. Pengaruh Adopsi Akuntansi Berbasis Akrua Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Se Jawa – Bali. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret.
- Mulyana, Budi. 2009. Penggunaan Akuntansi Akrua di negara –negara lain : Tren di Negara-negara Anggota OECD. <http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/Akuntansi-berbasis-akrua.pdf>. diakses pada 8 Juni 2016.
- Nurkhin, Ahmad. 2010. Corporate Governance Dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan. *Jurnal Dinamika Akuntansi (JDA)*, Vol. 2, No. 1, Maret 2010, pp 46-55. ISSN 2085-4277.
- O'Donovan, Gary. 2002. Environmental Disclosures In The Annual Report, Extending The Applicability And Predictive Power Of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 15 No. 3, 2002, pp. 344-371.
- Ofoegbu and Grace, N. 2014. New Public Management and Accrual Accounting Basis for Transparency and Accountability in The Nigerian Public Sector. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)* Volume 16, Issue 7. Ver. III PP 104-113, e-ISSN 2278-487X, p-ISSN 2319-7668.

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 1998). Tentang Penyajian Laporan Keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Republik Indonesia (2003). Undang-Undang tentang Keuangan Negara. UU Nomor 17 Tahun 2003.
- Republik Indonesia (2005). Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 24 Tahun 2005.
- Republik Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 71 Tahun 2010.
- Ritonga, H. Rahmansyah. 2006. Kas Basis Vs Akrua Basis. Widyaiswara BDK Medan, <http://sumut.kemenag.go.id/>, diakses pada 14 Agustus 2016.
- Rusmana, Oman dan Esti Saraswati. 2011. Conversion Of Local Government Financial Report (LKPD) Cash Toward Accrual Basis To Become Accrual Basis (Case Study in Local Government of Cirebon City). *Prosiding Seminas Competitive Advantage* Vol 1, No. 1 (2011).
- Sari, Dita Puspita dan Hendrawan Santosa Putra. 2012. Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *JEAM* Vol XI No. 2/2012, ISSN : 1412-5366.
- Sari, Vita Fitria. 2015. Analisis Perbandingan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dan Wajar Dengan Pengecualian. *Jurnal Praktik Bisnis*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2015, ISSN 2302-9242.
- Shonhadji, Nanang. 2010. Accrual Accounting & Financial Reporting in The Public Sector to Enhance Accountability and Transparency (Reframing Implementation in Indonesia). *Ekuitas* Vol. 14 No. 1 Maret 2010 : 22 – 38, ISSN : 1411-0393.
- Silalahi, Ulber. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Cetakan Keempat (Edisi Revisi), Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Simanjuntak, Binsar H. 2005. Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, <http://ksap.org/Riset&Artikel/Art7.pdf>, diakses 22 Agustus 2016.
- Sofia, Alfira dan Husen, Bagus. 2013. Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan Informasi Pada Website. *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vo. 12 No. 4 April 2013.
- Solihin, Dadang. 2007. Pengukuran Good Governance Index. Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik – BAPPENAS.
- Suchman, Mark C. 1995. Managing Legitimacy : Strategic And Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, Vol. 20, No. 3 (Jul, 1995), pp. 571-610.
- Sugiyono dan Agus Susanto. 2015. *Cara Mudah Belajar SPSS & LISREL Teori dan Aplikasi untuk Analisis Data Penelitian*. Cetakan Kesatu, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sukhemi. 2011. Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Keuangan Daerah. *Akmenika UPY*, Volume 8, 2011.
- Supardi, U.S. 2014, *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian, Konsep Statistika Yang Lebih Komprehensif*. Cetakan IV, Penerbit Prima Ufuk Semesta, Jakarta.
- Surepno. 2015. Kunci Sukses dan Peran Strategis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua. *JDA* Vol. 7 No. 2 PP 119-128. ISSN 2085-4277.
- Tickell, Geoffrey. 2010. Cash To Accrual Accounting : One Nation's Dilemma. *International Business & Economics Research Journal*, November 2010. Volume 9, No. 11.
- Upping, Phetphairin and Oliver, Judy. 2011. Accounting Change Model For The Public Sector : Adapting Luder's Model For Developing Countries. *International Review of Business Research Papers*. Vol. 7 No. 1 January 2011. PP. 364 – 380.

Lampiran

Lampiran 1
Daftar Pemerintah Daerah Yang Telah Menerapkan SAP Berbasis Akrual Sebelum Tahun 2015 & Perolehan Opini BPK RI Atas LKPD TA 2012-2014

N O	PEMERINTAH DAERAH	SAP BERBASIS KAS		SAP BERBASIS AKRUAL	KETERANGAN (OPINI BPK RI SETELAH AKRUAL)
		OPINI BPK RI		OPINI BPK RI	
		2012	2013	2014	
1	Provinsi Sumatera Utara: Kab. Labuhanbatu Selatan	WDP	WTP	WTP DPP	PENURUNAN
Provinsi Jawa Tengah :					
2	Kab. Banyumas	WTP	WTP	WTP DPP	PENURUNAN
3	Kab. Jepara	WTP	WTP DPP	WTP DPP	TETAP
4	Kab. Temanggung	WTP	WTP	WTP	TETAP
5	Kota Semarang	WTP (SAP Akrual)	WTP DPP (SAP Akrual)	WDP	PENURUNAN
Provinsi Jawa Timur :					
6	Kab. Banyuwangi	WTP	WTP	WTP	TETAP
Provinsi Banten :					
7	Kab. Pandeglang	WDP	WDP	TMP	PENURUNAN
8	Kota Tangerang	WTP	WTP	WTP	TETAP
9	Provinsi Kalimantan Barat : Kota Pontianak	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP	TETAP

Sumber : BPK RI (data diolah)

Lampiran 2
Data Sampel Penelitian

No	Propinsi	Pemprov	Pemda	Populasi	Sampel Slovin	Sampel	
1	Aceh	1	23	24	$24/530 \times 228 =$	10,32	11
2	Sumatera Utara	1	32	33	$33/530 \times 228 =$	14,20	15
3	Sumatera Barat	1	19	20	$20/530 \times 228 =$	8,60	9
4	Riau	1	12	13	$13/530 \times 228 =$	5,59	6
5	Jambi	1	11	12	$12/530 \times 228 =$	5,16	6
6	Sumatera Selatan	1	17	18	$18/530 \times 228 =$	7,74	8
7	Bengkulu	1	10	11	$11/530 \times 228 =$	4,73	5
8	Lampung	1	15	16	$16/530 \times 228 =$	6,88	7
9	Kepulauan Babel	1	7	8	$8/530 \times 228 =$	3,44	4
10	Kepulauan Riau	1	7	8	$8/530 \times 228 =$	3,44	4
11	DKI Jakarta	1	-	1	$1/530 \times 228 =$	0,43	1

12	Jawa Barat	1	27	28	$28/530 \times 228 =$	12,05	13
13	Jawa Tengah	1	31	32	$32/530 \times 228 =$	13,77	14
14	DI Yogyakarta	1	5	6	$6/530 \times 228 =$	2,58	3
15	Jawa Timur	1	37	38	$38/530 \times 228 =$	16,35	17
16	Banten	1	6	7	$7/530 \times 228 =$	3,01	4
17	Bali	1	9	10	$10/530 \times 228 =$	4,30	5
18	Nusa Tenggara Barat	1	10	11	$11/530 \times 228 =$	4,73	5
19	Nusa Tenggara Timur	1	22	23	$23/530 \times 228 =$	9,89	10
20	Kalimantan Barat	1	13	14	$14/530 \times 228 =$	6,02	7
21	Kalimantan Tengah	1	14	15	$15/530 \times 228 =$	6,45	7
22	Kalimantan Selatan	1	13	14	$14/530 \times 228 =$	6,02	7
23	Kalimantan Timur	1	10	11	$11/530 \times 228 =$	4,73	5
24	Kalimantan Utara	1	5	6	$6/530 \times 228 =$	2,58	3
25	Sulawesi Utara	1	15	16	$16/530 \times 228 =$	6,88	7
26	Sulawesi Tengah	1	13	14	$14/530 \times 228 =$	6,02	7
27	Sulawesi Selatan	1	24	25	$25/530 \times 228 =$	10,75	11
28	Sulawesi Tenggara	1	14	15	$15/530 \times 228 =$	6,45	7
29	Gorontalo	1	6	7	$7/530 \times 228 =$	3,01	4
30	Sulawesi Barat	1	6	7	$7/530 \times 228 =$	3,01	4
31	Maluku	1	11	12	$12/530 \times 228 =$	5,16	6
32	Maluku Utara	1	10	11	$11/530 \times 228 =$	4,73	5
33	Papua	1	29	30	$30/530 \times 228 =$	12,91	13
34	Papua Barat	1	13	14	$14/530 \times 228 =$	6,02	7
Jumlah		34	496	530			247

Lampiran 3

Rincian Hasil Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Variabel

No	Variabel	Uji Normalitas		Uji Homogenitas		Uji Beda yang digunakan
		Asymp. Sig. (2-tailed)	Ket	Sig.	Ket	
A Subvariabel Kinerja Keuangan :						
1	Rasio Likuiditas 2014	0,000	Tidak Normal	0,001	Tidak Homogen	<i>Wilcoxon signed rank test</i>
	Rasio Likuiditas 2015	0,000	Tidak Normal			
2	Rasio Solvabilitas 2014	0,000	Tidak Normal	0,000	Tidak Homogen	<i>Wilcoxon signed rank test</i>
	Rasio Solvabilitas 2015	0,000	Tidak Normal			
		0,000	Tidak			<i>Wilcoxon</i>

3	Rasio Utang 2014	Normal	0,000	Tidak	<i>signed rank</i>
		Tidak		Homogen	<i>test</i>
	Rasio Utang 2015	Normal			

No	Variabel	Uji Normalitas		Uji Homogenitas		Uji Beda yang digunakan
		Asymp. Sig. (2-tailed)	Ket	Sig.	Ket	
4	Rasio Pertumbuhan Pendapatan 2014	0,139	Normal	0,000	Tidak Homogen	<i>Wilcoxon signed rank test</i>
	Rasio Pertumbuhan Pendapatan 2015	0,478	Normal			
5	Derajat Desentralisasi 2014	0,000	Tidak Normal	0,808	Homogen	<i>Wilcoxon signed rank test</i>
	Derajat Desentralisasi 2015	0,000	Normal			
6	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2014	0,000	Tidak Normal	0,628	Homogen	<i>Wilcoxon signed rank test</i>
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2015	0,000	Normal			
7	Rasio Efektivitas PAD 2014	0,000	Tidak Normal	0,162	Homogen	<i>Wilcoxon signed rank test</i>
	Rasio Efektivitas PAD 2015	0,003	Normal			
8	Rasio Efektivitas Pajak Daerah 2014	0,000	Tidak Normal	0,517	Homogen	<i>Wilcoxon signed rank test</i>
	Rasio Efektivitas Pajak Daerah 2015	0,000	Normal			
9	Rasio Efisiensi Belanja 2014	0,021	Tidak Normal	0,000	Tidak Homogen	<i>Wilcoxon signed rank test</i>
	Rasio Efisiensi Belanja 2015	0,145	Normal			
10	Derajat Kontribusi BUMD 2014	0,000	Tidak Normal	0,273	Homogen	<i>Wilcoxon signed rank test</i>
	Derajat Kontribusi BUMD 2015	0,000	Normal			
11	Rasio Belanja Operasi 2014	0,277	Normal	0,112	Homogen	<i>Paired Sample T-Test</i>
	Rasio Belanja Operasi 2015	0,203	Normal			
12	Rasio Belanja Modal 2014	0,041	Tidak Normal	0,468	Homogen	<i>Wilcoxon signed rank test</i>
	Rasio Belanja Modal 2015	0,161	Normal			
13	Rasio Pertumbuhan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 2014	0,032	Tidak Normal	0,003	Tidak Homogen	<i>Wilcoxon signed rank test</i>
	Rasio Pertumbuhan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 2015	0,264	Normal			
14	Rasio Pertumbuhan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Nonkeuangan 2014	0,007	Tidak Normal	0,094	Homogen	<i>Wilcoxon signed rank test</i>
	Rasio Pertumbuhan Arus Kas					

Bersih dari Aktivitas Investasi 0,062 Normal

Nonkeuangan 2015							
No	Variabel	Arus Kas	Uji Normalitas		Uji Homogenitas		Uji Beda Wilcoxon signed rank test
			0,000 Asymp. Sig. (2- tailed)	Tidak Normal Ket Tidak	Sig.	Ket	
15	Rasio Pertumbuhan Bersih dari Pembiayaan 2014	Arus Kas Aktivitas	0,000 Asymp. Sig. (2- tailed)	Tidak Normal Ket Tidak	0,060	Homogen	
	Rasio Pertumbuhan Bersih dari Pembiayaan 2015	Arus Kas Aktivitas	0,000	Normal			

No	Variabel	Uji Normalitas		Uji Homogenitas		Uji Beda yang digunakan
		Asymp. Sig. (2-tailed)	Ket	Sig.	Ket	
16	Rasio Pertumbuhan Arus Kas Bebas (Free Cash Flow) 2014	0,000	Tidak Normal	0,442	Homogen	<i>Wilcoxon signed rank test</i>
	Rasio Pertumbuhan Arus Kas Bebas (Free Cash Flow) 2015	0,000	Tidak Normal			
B Variabel Akuntabilitas						
	Akuntabilitas 2014	0,000	Tidak Normal	0,442	Homogen	<i>Wilcoxon signed rank test</i>
	Akuntabilitas 2015	0,000	Tidak Normal			
C Variabel Transparansi						
	Transparansi 2014	0,000	Tidak Normal	0,001	Tidak Homogen	<i>Wilcoxon signed rank test</i>
	Transparansi 2014	0,094	Normal			

Lampiran 4

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Kinerja Keuangan			
Hipotesis	Subvariabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Kriteria Hasil : < 0,05 : Ha Diterima > 0,05 : Ha Ditolak
H _{1.1}	Rasio Likuiditas	0,000	Ha Diterima
H _{1.2}	Rasio Solvabilitas	0,000	Ha Diterima
H _{1.3}	Rasio Utang	0,000	Ha Diterima
H _{1.4}	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	0,000	Ha Diterima
H _{1.5}	Derajat Desentralisasi	0,538	Ha Ditolak
H _{1.6}	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	0,001	Ha Diterima
H _{1.7}	Rasio Efektivitas PAD	0,101	Ha Ditolak
H _{1.8}	Rasio Efektivitas Pajak Daerah	0,025	Ha Diterima
H _{1.9}	Rasio Efisiensi Belanja	0,000	Ha Diterima
H _{1.10}	Derajat Kontribusi BUMD	0,956	Ha Ditolak
H _{1.11}	Rasio Belanja Operasi	0,000	Ha Diterima
H _{1.12}	Rasio Belanja Modal	0,000	Ha Diterima
H _{1.13}	Rasio Pertumbuhan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	0,000	Ha Diterima

Hipotesis	Subvariabel	Asymp. Sig. (2-	Kriteria Hasil :
		<i>tailed</i>)	< 0,05 : Ha Diterima > 0,05 : Ha Ditolak
H _{1.14}	Rasio Pertumbuhan Arus Kas Bersih dari Aktivitas	0,013	Ha Diterima
Investasi Nonkeuangan			
H _{1.15}	Rasio Pertumbuhan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	0,000	Ha Diterima
H _{1.16}	Rasio Pertumbuhan Arus Kas Bebas (<i>Free Cash Flow</i>)	0,001	Ha Diterima

Lampiran 5

Test Statistics^a

Akuntabilitas Sesudah Akrual TA 2015 – Akuntabilitas Sebelum Akrual TA 2014	-7,043 ^b
	0,000

a. *Wilcoxon Signed Ranks Test*

b. *Based on negative ranks.*

Lampiran 6

Test Statistics^a

Transparansi Sesudah Akrual 2015 – Transparansi Sebelum Akrual 2014	-12,252 ^b
	0,000

a. *Wilcoxon Signed Ranks Test*

b. *Based on negative ranks.*

Nomor: e-578/SNA-XXI/2018



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK

Sertifikat

Diberikan Kepada:

SITI MAGHFIROH

Sebagai

PEMAKALAH

SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI XXI

“Peran Akuntan Pendidik dengan Semangat *Ruhui Rahayu*
Memacu Pembangunan Ekosistem Indonesia yang Berkelanjutan”

Diselenggarakan Oleh
Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik
Bekerjasama dengan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
Pada Tanggal 5-7 September 2018

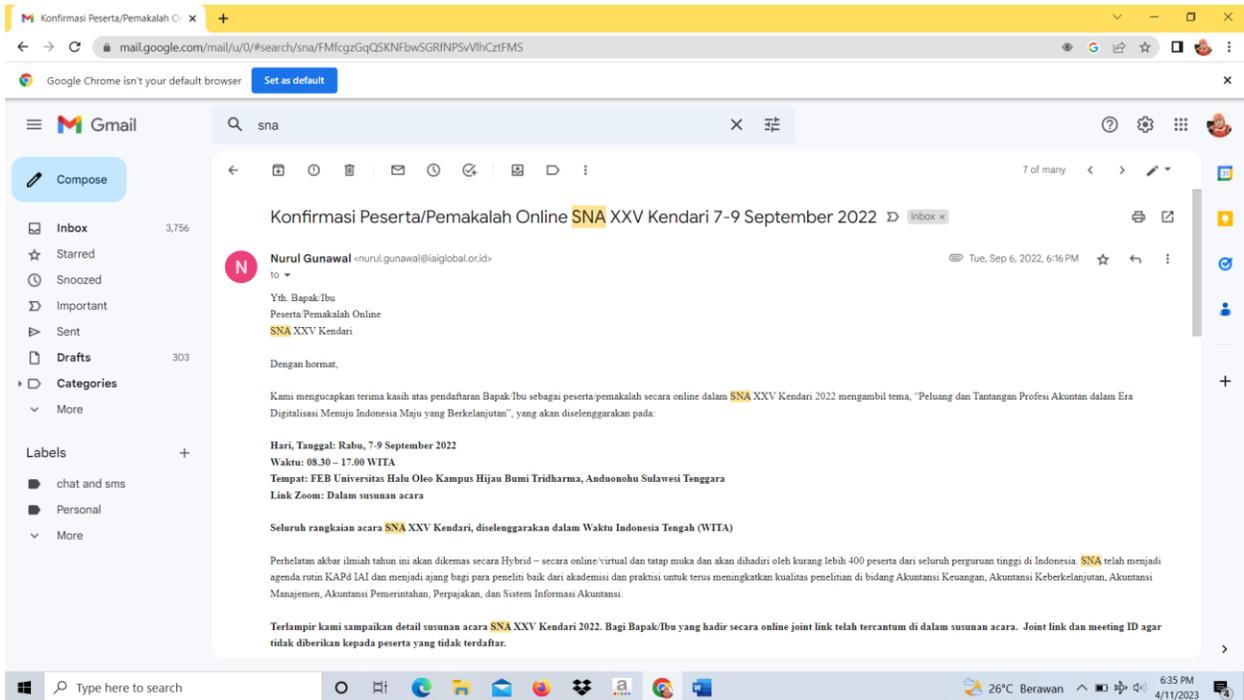
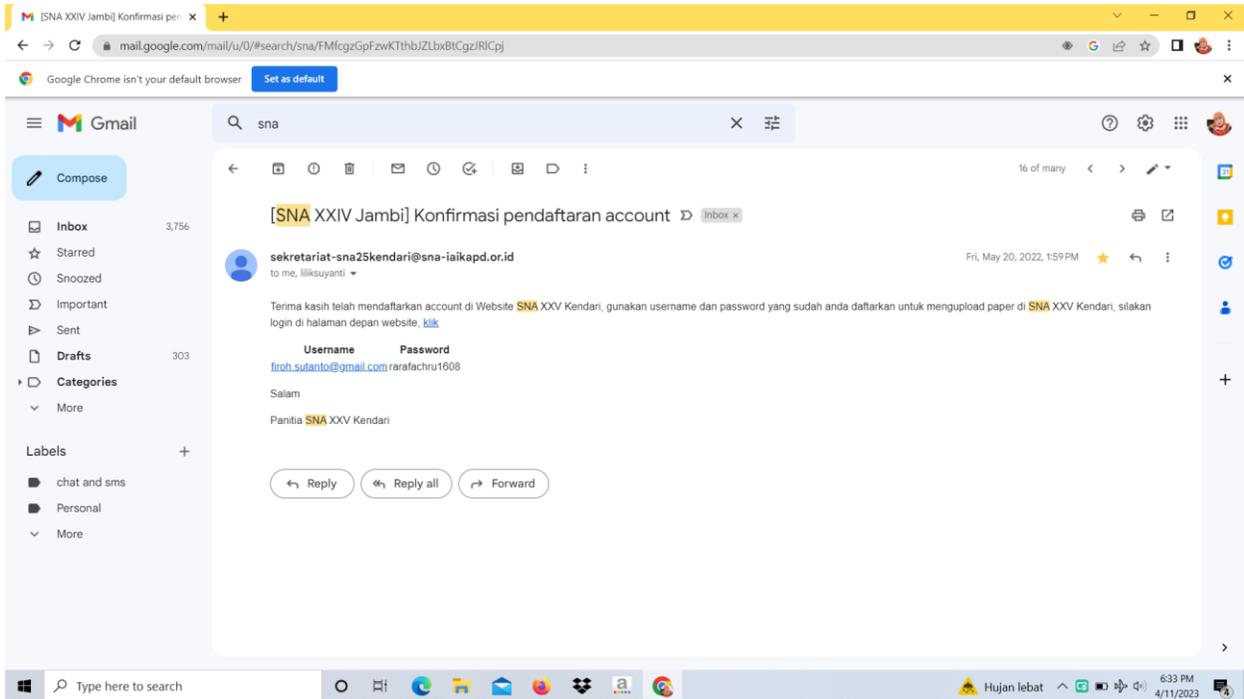
Dengan nilai 18 SKP

Samarinda, 7 September 2018

Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah, S.E., M.Si., Ak., CA

Ketua IAI KAPd Periode 2016-2018

SEBAGAI KORESPONDEN SNA 25 KENDARI



Konfirmasi Peserta/Pemakalah

mail.google.com/mail/u/0/#search/sna/FMfcgzGqQSKNFbwGRINPSVihCztFMS

Google Chrome isn't your default browser

Gmail

Compose

Inbox 3,756

Starred

Snoozed

Important

Sent

Drafts 303

Categories

More

Labels

chat and sms

Personal

More

7 of many

E-mail atau file ini bersifat rahasia dan ditujukan hanya untuk penggunaan pribadi atau badan kepada siapa yang mereka ditujukan. Jika Anda bukan penerima yang dituju, atau orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada mereka, Anda tidak boleh menyalin, meneruskan mengungkapkannya dengan cara apapun. Untuk melakukannya termasuk tindakan pelanggaran hukum. Jika Anda menerima e-mail karena kesalahan, mohon Anda segera memberitahu pengirim. This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended addressee, or the person responsible for delivering it to them, you may not copy, forward disclose or otherwise use it or any part of it in any way. To do so may be unlawful. If you receive this e-mail by mistake, please advise the sender immediately. Please consider the environment before printing this email.

2 Attachments • Scanned by Gmail

Reply Forward

Type here to search

26°C Berawan 6:36 PM 4/11/2023

E-Certificate Simposium Nasional

mail.google.com/mail/u/0/#search/sna/FMfcgzGqQStcTcwKFLRFc(ITDXKGBwJ)

Google Chrome isn't your default browser

Gmail

Compose

Inbox 3,756

Starred

Snoozed

Important

Sent

Drafts 303

Categories

More

Labels

chat and sms

Personal

More

5 of many

E-Certificate Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XXV Kendari 2022

PPL <ppl@iaiglobal.or.id> to me

Wed, Sep 14, 2022, 9:09 PM

Yth Bapak/Ibu Peserta/Pemakalah
Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XXV Kendari 2022

Dengan hormat,

Kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XXV Kendari 2022 dengan tema "PELUANG DAN TANTANGAN PROFESI AKUNTAN DALAM ERA DIGITALISASI MENUJU INDONESIA MAJU YANG BERKELANJUTAN", yang telah dilaksanakan secara Hybrid pada tanggal 7-8 September 2022.

Sesuai dengan keikutsertaan Bapak/Ibu, terlampir kami sampaikan e-sertifikat keikutsertaan Bapak/Ibu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

INSTITUT AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng Jakarta 10310
Phone: +62(21)3190 4232 | WA Official: +62011055144
Fax: +62(21)320 0015 | www.iaa.or.id
Contact us at: [website](#) | [map](#) | [email](#) | [twitter](#) | [facebook](#) | [linkedin](#) | [instagram](#)

Type here to search

26°C Berawan 6:36 PM 4/11/2023

E-Certificate Simposium Nasional x +

mail.google.com/mail/u/0/#search/sna/FMfcgZGqQStcTowkFLRFcVTDXKGBxfj

Google Chrome isn't your default browser [Set as default](#)

Gmail sna

Compose

- Inbox 3,756
- Starred
- Snoozed
- Important
- Sent
- Drafts 303
- Categories
 - More
- Labels +
 - chat and sms
 - Personal
 - More

5 of many



E-mail atau file ini bersifat rahasia dan ditujukan hanya untuk penggunaan pribadi atau badan kepada siapa yang mereka ditujukan. Jika Anda bukan penerima yang dituju, atau orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada mereka, Anda tidak boleh menyalin, meneruskan mengungkapkan atau menggunakannya dengan cara apapun. Untuk melakukannya termasuk tindakan pelanggaran hukum. Jika Anda menerima e-mail karena kesalahan, mohon Anda segera memberitahu pengirim. This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended addressee, or the person responsible for delivering it to them, you may not copy, forward disclose or otherwise use it or any part of it in any way. To do so may be unlawful. If you receive this e-mail by mistake, please advise the sender immediately. Please consider the environment before printing this email.

One attachment • Scanned by Gmail



Siti Maghfroh.pdf

Reply Forward

Type here to search

26°C Berawan 6:36 PM 4/11/2023